



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

STRATEGI SANITASI KOTA Kota Banda Aceh

VOLUME 1: KERANGKA KERJA PEMBANGUNAN SANITASI



Versi 1, November 2009

Disiapkan oleh Tim Sanitasi Kota Banda Aceh

TIM PELAKSANA SANITASI KOTA BANDA ACEH

Sekretariat: Gedung Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Lt. 3

Jalan Pocut Baren, Kota Banda Aceh

Telp: 0651 – 32560

Fax: 0651 – 32560

Email: timsanitasibandaaceh@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi hidayah dan petunjuk sehingga penyelesaian penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota Volume 1: *Kerangka Kerja Pembangunan Sanitasi* Kota Banda Aceh. Dokumen ini, yang lebih dikenal sebagai SSK, merupakan sebuah kerangka kerja yang memuat strategi pengembangan sanitasi tidak hanya dalam hal pengembangan infrastruktur, akan tetapi juga strategi mengenai pengembangan bidang kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi publik dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Banda Aceh menjadi Bandar Wisata Islami Indonesia.

Selain berisi penjelasan atas strategi pengembangan sanitasi di Kota Banda Aceh, dokumen ini juga memuat penyusunan prioritas (*priority setting*) pembangunan sanitasi terutama dalam bidang infrastruktur yang sangat berguna sebagai masukan dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan yang tertuang dalam RPKK. Disamping itu, karena memiliki waktu perencanaan yang panjang hingga tahun 2025, dokumen ini merupakan salah satu dokumen penting yang dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun Renstra SKPK.

Agar strategi pengembangan sanitasi ini dapat diterima oleh seluruh warga kota maka dokumen ini telah diseminarkan dalam sebuah seminar dengan tema "*Pembangunan Sanitasi untuk Pelayanan Warga Kota yang Lebih Baik*" di bulan Agustus 2009 yang dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat dari tingkat Gampong hingga Pemerintahan Kota serta perwakilan dari kalangan akademisi dan LSM. Berbagai masukan yang diterima selama seminar tersebut telah menjadi bahan penting dalam rangka penyempurnaan dokumen SSK ini. Seminar tersebut juga telah melahirkan sebuah Deklarasi Bersama antara seluruh komponen kota untuk mendukung serta berpartisipasi dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi di Kota Banda Aceh. Deklarasi ini merupakan tonggak penting bagi upaya pembangunan sanitasi yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan di Kota Banda Aceh.

Pada akhirnya, sebuah dokumen strategi tidak akan berarti dan bermanfaat apabila tidak menjadi acuan dalam proses pembangunan sebenarnya. Sehingga saya berharap, Strategi Sanitasi Kota Volume 1 yang telah kita miliki ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar dan acuan bagi SKPK dalam penyusunan kegiatan khususnya bidang sanitasi serta dapat pula digunakan oleh lembaga-lembaga lain yang memiliki inisiatif serta niatan untuk bergerak bersama dalam pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 November 2009

 Walikota Banda Aceh 



 Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR ISTILAH	iii
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan dan sasaran.....	2
1.3 Landasan hukum	2
1.4 Sistematika dokumen	2
BAB 2 : GAMBARAN UMUM KOTA DAN RENCANA PENGEMBANGANNYA	3
2.1 Batas administrasi dan kependudukan.....	3
2.2 Tata kelola pemerintahan kota.....	3
2.3 Pengembangan Kota Banda Aceh	6
BAB 3 : STRATEGI MENYELURUH PENGEMBANGAN SANITASI KOTA	10
3.1 Visi dan misi sanitasi	10
3.2 Tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi.....	10
3.3 Kebijakan umum pengembangan sanitasi kota.....	10
3.4 Kebijakan saat ini.....	11
BAB 4 : PENGEMBANGAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR SANITASI 2010 – 2025.....	12
4.1 Air bersih.....	12
4.2 Air limbah	16
4.3 Drainase.....	19
4.4 Persampahan	22
BAB 5 : STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK 2010 – 2025.....	26
5.1 Kegiatan pemantauan layanan sanitasi.....	26
5.2 Keterlibatan masyarakat	26
5.3 Keterlibatan swasta dan dunia usaha.....	28
5.4 Komunikasi	28
BAB 6 : STRATEGI TATA KELOLA SANITASI 2010 – 2025.....	29
6.1 Perkembangan tim sanitasi	29
6.2 Memperkuat kerangka hukum lokal untuk pengembangan sanitasi.....	29
6.3 Strategi pendanaan sanitasi.....	31
6.4 Persiapan proyek dan proses penganggaran.....	31
Lampiran: Naskah deklarasi bersama sanitasi	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Peta sebaran kepadatan per-kelurahan/desa berdasarkan data penduduk tahun 2007	4
Gambar 2-2	Alur proses penganggaran dan perencanaan yang berlaku.....	5
Gambar 2-3	Struktur organisasi Tim Sanitasi Kota Banda Aceh.....	6
Gambar 2-4	Peta tata guna lahan Kota Banda Aceh tahun 2005.....	7
Gambar 2-5	Pengaruh perkembangan Kota Banda Aceh terhadap Kabupaten Aceh Besar	8
Gambar 2-6	Peta rencana struktur ruang tahun 2026 Kota Banda Aceh.....	9
Gambar 4-1	Penyusunan wilayah prioritas pengembangan air bersih berdasarkan data penduduk tahun 2007	13
Gambar 4-2	Sebaran wilayah penanganan kebocoran dalam kegiatan BRP hingga tahun 2009.....	14
Gambar 4-3	Peta jaringan distribusi air bersih PDAM Tirta Daroy tahun 2009.....	15
Gambar 4-4	Penyusunan wilayah prioritas pengelolaan air limbah berdasarkan data penduduk tahun 2007	17
Gambar 4-5	Perencanaan pengembangan sistem offsite	18
Gambar 4-6	Peta pembagian zona drainase dan jadwal rehabilitasi saluran drainase utama	19
Gambar 4-7	Peta distribusi jaringan drainase mikro tipe 1 di Kota Banda Aceh (lokasi wilayah percontohan)	20
Gambar 4-8	Penyusunan wilayah prioritas pembangunan drainase mikro berdasarkan data penduduk tahun 2007	21
Gambar 4-9	Peta sebaran wilayah dengan layanan pengangkutan sampah reguler saat ini	23
Gambar 4-10	Penyusunan wilayah prioritas pelayanan persampahan berdasarkan data penduduk tahun 2007	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Klasifikasi kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh	3
Tabel 4-1	Klasifikasi saluran drainase mikro	20
Tabel 4-2	Ringkasan rencana pengembangan sanitasi jangka panjang di Kota Banda Aceh.....	25

DAFTAR ISTILAH

AMPL	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBK	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
BRR	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh - Nias
DED	Detailed Engineering Design
DPRK	Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Gampong	Desa
Geutchik	Kepala Desa
IPA	Instalasi Pengolahan Air
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
MDGs	Millenium Development Goals
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Qanun	Peraturan Daerah
Renstra	Rencana Strategis
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RKPK	Rencana Kerja Pembangunan Kota
SKPK	Satuan Kerja Perangkat Kota
SNI	Standar Nasional Indonesia
SPM	Standar Pelayanan Minimum
SOTK	Struktur Organisasi Tingkat Kota
SSK	Strategi Sanitasi Kota
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
UNDP	United Nations Development Program

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi kota secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk mencapai target minimal layanan sanitasi mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM), Millenium Development Goals (MDGs) maupun peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Khususnya untuk Kota Banda Aceh, dokumen lengkap SSK terdiri dari tiga volume dengan susunan sebagai berikut:

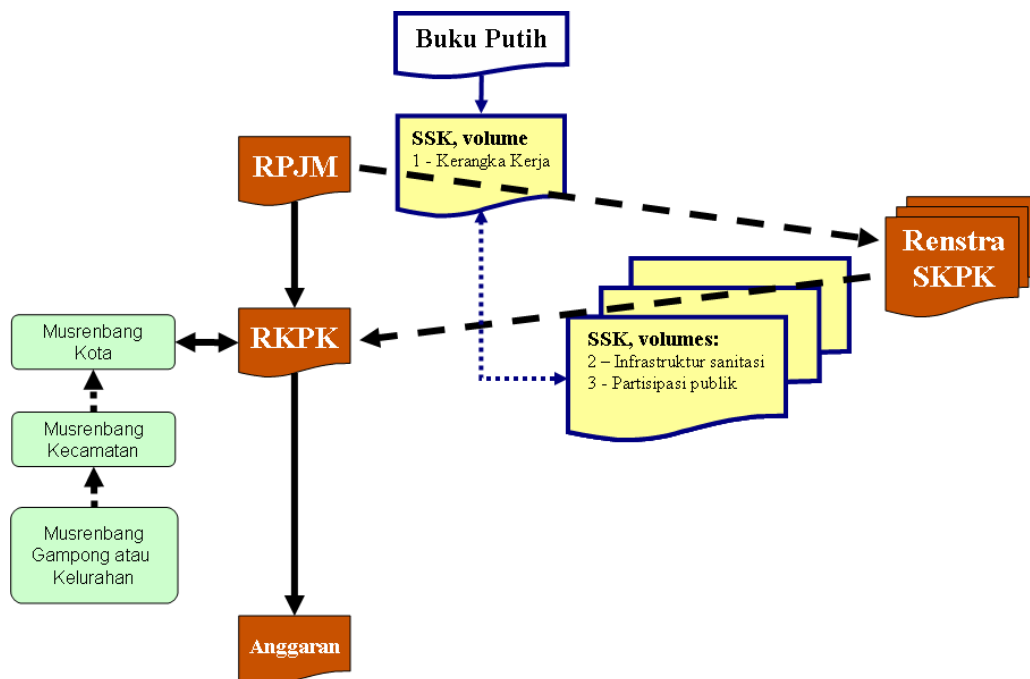
- Volume 1 : Kerangka kerja pembangunan sanitasi
- Volume 2 : Pengembangan strategis infrastruktur sanitasi
- Volume 3 : Strategi peningkatan partisipasi public

SSK Volume 1 memberikan gambaran ringkas mengenai strategi pengembangan sanitasi jangka panjang Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2025. Pengguna utama dari SSK Volume 1 ini adalah Walikota/Bupati, Kepala Dinas, Badan, Direktur di tingkat Kota maupun Provinsi serta jajaran Dirjen terkait di pusat. SSK Volume 2 dan 3 berisikan penjelasan lengkap dan rinci mengenai strategi pengembangan sanitasi serta rencana pelaksanaan tahunan yang dibagi dalam tiga periode perencanaan yaitu jangka pendek, menengah serta panjang. Strategi mengenai tata kelola sanitasi dibahas secara terbatas hanya pada Volume 1 ini, yaitu pada Bab 6, mengingat pembahasan mengenai hal ini masih dilakukan di internal Tim Sanitasi. Dasar yang digunakan adalah studi komprehensif dari *Sea Defence Consultants* (SDC) yang berjudul *Needs and Opportunities for Sanitation Governance in Banda Aceh* tahun 2009. Pengaturan atas sumber pendanaan yang memungkinkan bagi kegiatan pengembangan sanitasi yang biayanya diindikasikan dalam SSK Volume 2 dan 3 akan dilakukan lebih lanjut pada saat dilakukannya penyusunan RKPK.

SSK disusun sebagai penjabaran operasional dari RPJMK khususnya bidang sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif dengan mengakomodasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pembangunan Kota (SKPK). Ke depan, SSK diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) bidang sanitasi.

Secara sederhana, hubungan SSK dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan sebagaimana ditunjukkan gambar 1-1 berikut.

Gambar 1-1 Proses dan hubungan SSK dengan dokumen perencanaan lain



1.2 Tujuan dan sasaran

SSK Volume 1 versi 1 disusun untuk memberikan gambaran ringkas mengenai visi jangka panjang pembangunan sanitasi Kota Banda Aceh yang disertai dengan penyusunan prioritas pembangunan sanitasi serta rencana tindak tahunan yang disusun secara sistematis untuk dapat mencapai target-target pelayanan yang telah ditetapkan. Penjelasan rinci atas strategi tersebut tersedia dalam SSK Volume 2, 3 dan 4.

1.3 Landasan hukum

Penyusunan SSK memiliki landasan hukum berikut ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum¹ (SPM);
- 7) Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 8) Qanun No. 2 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kerja Tata Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.4 Sistematika dokumen

Pembahasan strategi pengembangan sanitasi dalam dokumen ini terdiri dari enam (6) bab. Lima bab berikut dijelaskan sebagai tambahan dari Bab 1 mengenai Pendahuluan:

- **Bab 2** memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Kota Banda Aceh beserta rencana pengembangan kota;
- **Bab 3** berisi strategi umum pengembangan sanitasi yang meliputi visi misi sanitasi, tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi serta kebijakan umum pengembangan sanitasi;
- **Bab 4** berisi pengembangan strategis infrastruktur sanitasi untuk sektor air bersih, air limbah, drainase serta persampahan sampai dengan tahun 2025;
- **Bab 5** memberikan gambaran mengenai strategi peningkatan partisipasi publik dalam rangka pengembangan sanitasi jangka panjang, dan;
- **Bab 6** menyajikan penjelasan mengenai strategi pemerintah kota dalam kegiatan tata kelola sanitasi sampai dengan tahun 2025.

¹ Sampai saat ini SPM Sanitasi yang mengacu pada PP No. 65 Tahun 2005 belum ditetapkan oleh departemen teknis terkait. Akan tetapi, dalam penyusunan SSK ini Tim Sanitasi Kota Banda Aceh telah menjadikan kriteria dalam SPM Sanitasi sebagai dasar dalam penyusunan target dan strategi pengembangan sanitasi.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KOTA DAN RENCANA PENGEMBANGANNYA

2.1 Batas administrasi dan kependudukan

Pada tahun 2007, berdasarkan data dari BPS, total jumlah penduduk Kota Banda Aceh adalah 217.940 jiwa dengan kepadatan penduduk di 90 gampong/kelurahan² dalam 9 kecamatan di Banda Aceh telah diklasifikasikan berdasarkan ketentuan berikut ini:

Tabel 2-1 Klasifikasi kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh

Kepadatan (org/ha)	Klasifikasi	Warna	Prosentase atas total	
			% luas	% penduduk
< 25	Pedesaan (<i>rural</i>)		48,55%	16,78%
25 – 100	Peri-urban		47,81%	67,68%
100 – 175	Perkotaan rendah (<i>urban low</i>)		3,32%	12,94%
175 – 250	Perkotaan menengah (<i>urban medium</i>)		-	-
>250	Perkotaan tinggi (<i>urban high</i>)		0,33%	2,60%

Gambar 2-1 menunjukkan peta sebaran kepadatan³ di Banda Aceh berdasarkan klasifikasi yang ditentukan di atas.

2.2 Tata kelola pemerintahan kota

Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintah kota mengikuti alur dalam gambar 2-2 dimana RPJM memegang peranan strategis perencanaan pembangunan jangka menengah. Khusus di bidang sanitasi, RPJM Kota Banda Aceh 2007 – 2012 menyebutkan bahwa salah grand strategi untuk mencapai visi dan misi kota (penjelasan rinci visi misi kota dapat dilihat dalam Bab 3) adalah membangun infrastruktur perkotaan yang mendukung pariwisata (lihat **Boks 1**).

Kotak 1: Grand strategi pembangunan Kota Banda Aceh

(hanya rincian kegiatan grand strategi nomor empat yang ditampilkan dalam boks ini. Kegiatan rinci dalam poin grand strategi lain tidak ditampilkan)

1. Mewujudkan pemerintah yang amanah;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan;
4. **Membangun infrastruktur perkotaan yang mendukung pariwisata;**
 - a. Seluruh lokasi objek wisata, kawasan komersial memiliki sarana ibadah, pusat informasi, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan transportasi;
 - b. Pembangunan prasarana transportasi dan drainase kota;
 - c. Kota Banda Aceh bebas dari sampah dan seluruh sampah diolah menjadi produk bernilai tambah;
 - d. Kota Banda Aceh memiliki sistem mitigasi bencana yang efektif.
5. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat;

Sumber: RPJM Kota Banda Aceh, 2007 – 2012

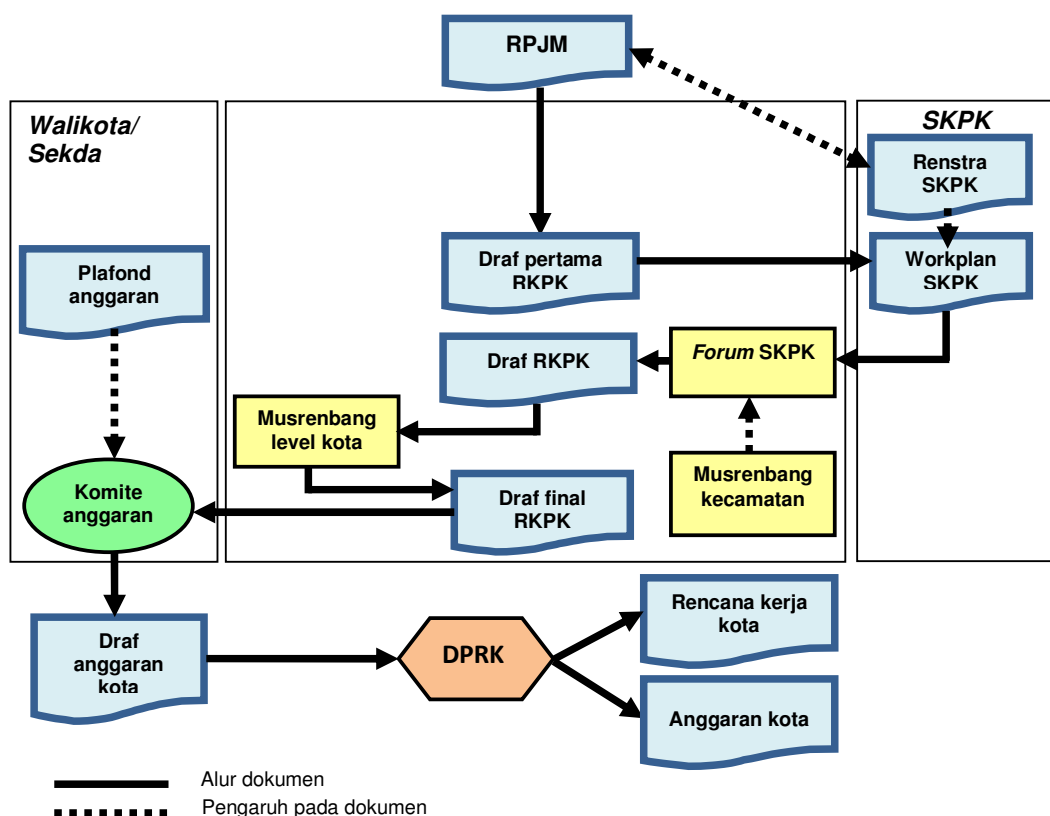
² Di dalam SSK volume ini dimana digunakan data tahun 2007, gampong/kelurahan di Banda Aceh masih berjumlah 89.

Pada tahun 2008 terjadi pemisahan antara Prada dan Lamgugop menjadi dua sehingga total gampong/kelurahan menjadi 90.

³ Data penduduk tahun 2007 bersumber pada *Masterplan Persampahan Kota Banda Aceh 2007* sedangkan data luas wilayah per kelurahan tahun 2005 bersumber dari *BPS: Kecamatan Dalam Angka Kota Banda Aceh tahun 2005*. Dalam analisa ini, jumlah penduduk komuter tidak dimasukkan karena tidak tersedia data yang mencukupi. Sehingga kepadatan penduduk nyata (terutama di siang hari) mungkin lebih tinggi daripada nilai yang ditampilkan terutama pada daerah-daerah perdagangan dan jasa.

[illegible]

Gambar 2-2 Alur proses penganggaran dan perencanaan yang berlaku



Untuk menjalankan operasional pemerintahan dalam rangka mencapai visi misi kota, pemerintahan kota menyusun Struktur Organisasi Tingkat Kota (SOTK) yang ditetapkan dalam Qanun. Pada tahun 2008 revisi atas SOTK lama telah disusun dalam Qanun No. 2 tahun 2008. Berdasarkan SOTK tersebut kegiatan sanitasi tersebar di berbagai dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK)/badan. Koordinasi intensif antar dinas/SKPK perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan pembangunan sanitasi secara terpadu dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi kota.

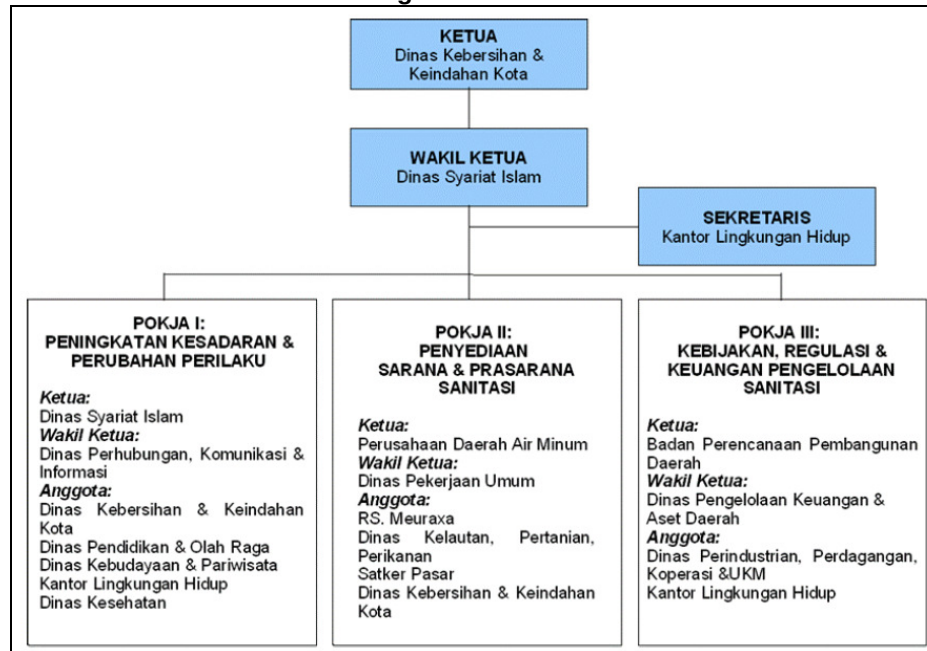
Untuk merespon upaya percepatan tersebut, pada tahun 2008 telah dibentuk Tim Sanitasi Kota melalui Keputusan Walikota No. 304 tahun 2008. Secara ringkas, tugas dan tanggung jawab tim ini adalah; (i) melakukan kajian sanitasi, (ii) menyusun rencana kerja tahunan, (iii) menyusun SSK, (iv) melakukan sosialisasi sanitasi, (v) melakukan koordinasi dengan dinas-dinas di kota maupun dengan Pokja AMPL di tingkat Provinsi Aceh, (vi) melakukan koordinasi dengan wilayah lain (Aceh Besar). Struktur tim ini dapat dilihat dalam gambar 2-3 pada halaman berikutnya.

Kotak 2: Sekilas mengenai Tim Sanitasi Kota Banda Aceh

Tim Sanitasi Kota Banda Aceh yang dibentuk pada tanggal 4 November 2008 telah memberikan artikulasi penting terhadap upaya dan perkembangan mewujudkan sanitasi terpadu Kota Banda Aceh. Dengan dukungan lembaga mitranya GTZ supported project SLGSR dan Sea Defence Consultants (SDC), Tim Sanitasi telah melahirkan sebuah Buku Putih Sanitasi yang merupakan dokumen penting tentang kondisi, situasi, dan problema sanitasi kota saat ini.

Tim Pelaksana Sanitasi terdiri dari perwakilan 13 SKPK. Tim Pelaksana Sanitasi mendapatkan pengarahan dari Tim Pengarah Sanitasi yang beranggotakan kepala-kepala SKPK dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh. Tim Sanitasi saat ini memiliki sekretariat di Gedung Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dimana dijalankan kegiatan rapat rutin sanitasi serta disimpan berbagai dokumen mengenai sanitasi di Kota Banda Aceh.

Gambar 2-3 Struktur organisasi Tim Sanitasi Kota Banda Aceh



2.3 Pengembangan Kota Banda Aceh

Tata guna lahan Kota Banda Aceh tahun 2005 dapat dilihat dalam gambar 2-4. Wilayah perdagangan dan jasa terkonsentrasi pada dua wilayah yaitu Kelurahan Peunayong dan Kelurahan Kampung Baro, sedangkan wilayah pemukiman tersebar hampir merata pada setengah wilayah kota bagian selatan.

Dalam proses alamiahnya, perkembangan kota tidak berhenti pada batas-batas administratif kota saja. Interaksi dengan wilayah perbatasan akan memberikan pengaruh penting terhadap pola pengembangannya. Dalam hal ini Sogreah⁴ menjelaskan (sebagai contoh adanya interaksi ini) bahwa dalam proses pengembangan layanan air bersih Kota Banda Aceh dipengaruhi secara kuat oleh interaksi di wilayah perbatasannya dengan Kabupaten Aceh Besar. Pengaruh dari pengembangan Kota Banda Aceh yang tidak hanya dirasakan di wilayah administratif Kota Banda Aceh saja, namun juga mencakup sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, terdapat infrastruktur sanitasi yang memberi layanan bagi Kota Banda Aceh akan tetapi terletak di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Gambar 2-5 menunjukkan lokasi berbagai infrastruktur yang berada di wilayah perbatasan.

Dengan kondisi interaksi tersebut, penting untuk melakukan kerjasama dan koordinasi bagi Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar khususnya dalam hal pengembangan sanitasi. Dua kegiatan di bawah ini direncanakan untuk dilakukan dapat rangka mencapai kondisi tersebut:

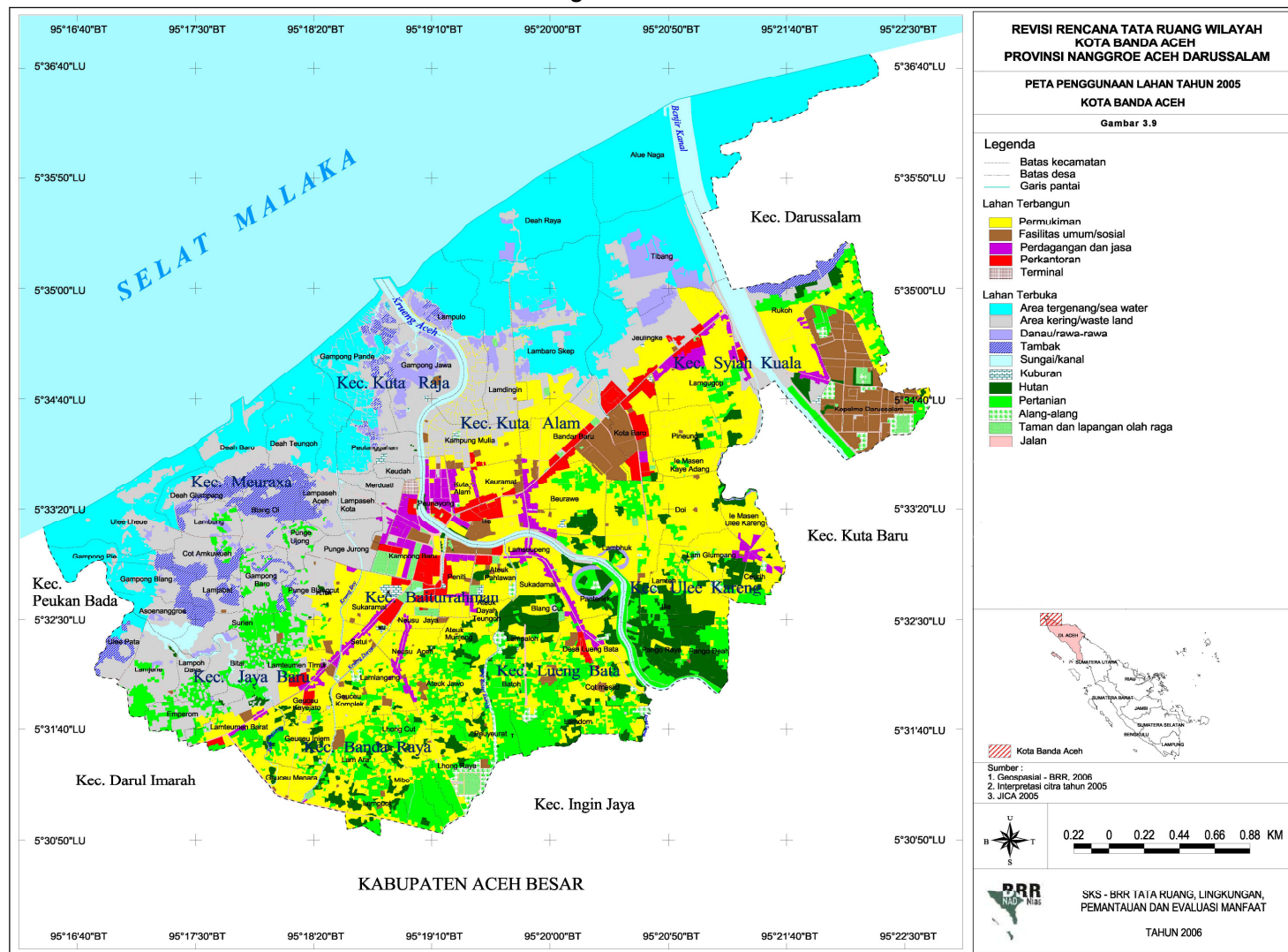
- Dalam jangka pendek mengembangkan integrasi aktivitas antara Pokja AMPL di Kabupaten Aceh Besar dengan kegiatan Tim Sanitasi Banda Aceh, sehingga,
- Dalam jangka panjang akan terjalin program bersama dalam rangka pengembangan sanitasi di kedua wilayah.

Penyusunan strategi pengembangan sanitasi dalam dokumen ini juga mempertimbangkan rencana pemanfaatan ruang tahun 2026 Kota Banda Aceh yang dapat dilihat dalam gambar 2-6. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa baru di wilayah Kota Banda Aceh bagian selatan (wilayah Batoh) serta pengembangan dua wilayah yang dikategorikan sebagai “sub-pusat”. Pengembangan jangka menengah dan panjang dalam bidang sanitasi harus selalu melihat rencana pengembangan wilayah tersebut.

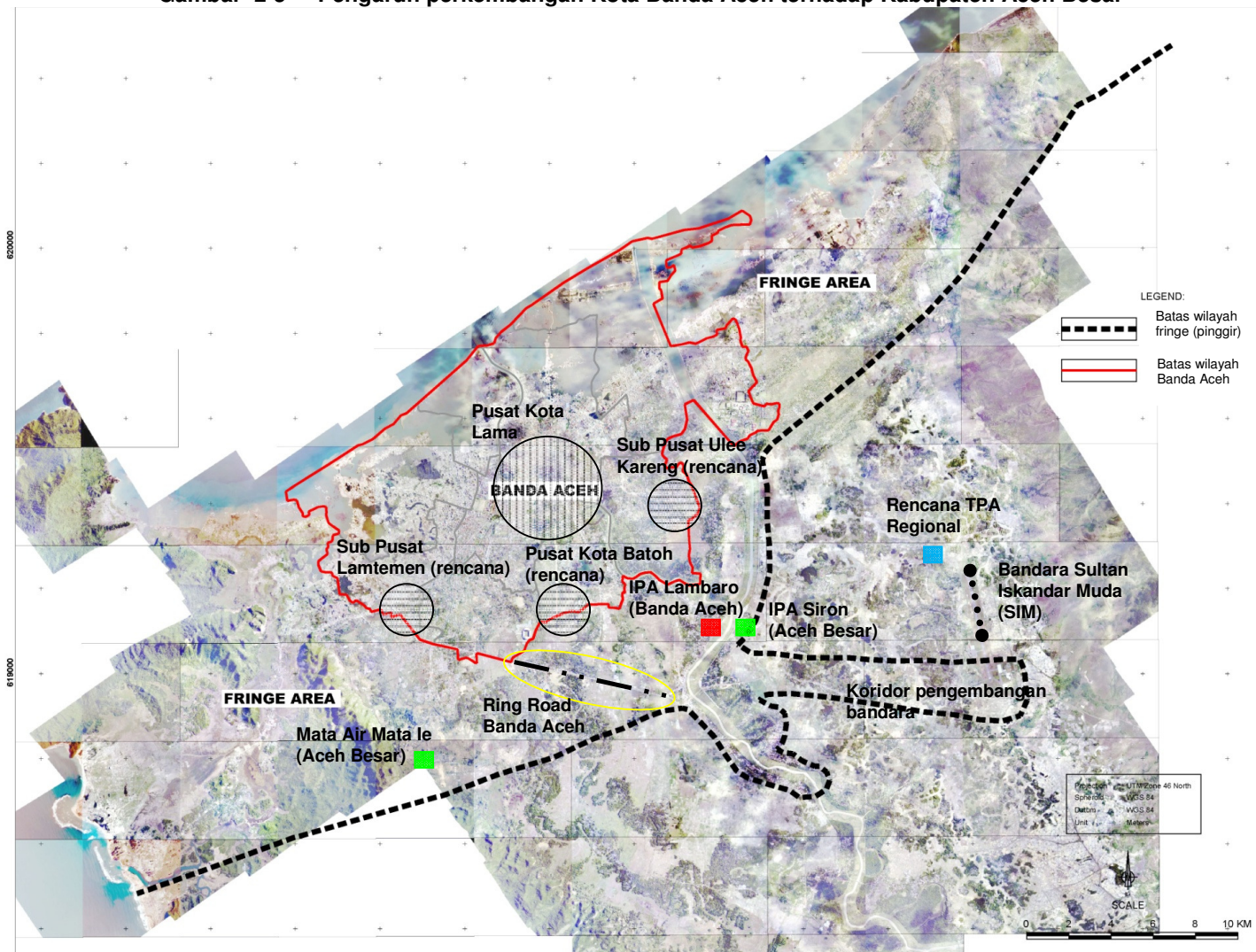
Dalam halaman-halaman berikut ini, peta-peta yang terkait dengan penjelasan di atas diberikan.

⁴ Sogreah, *Water strategy 2007 – 2030 and short term action plan*, November 2007.

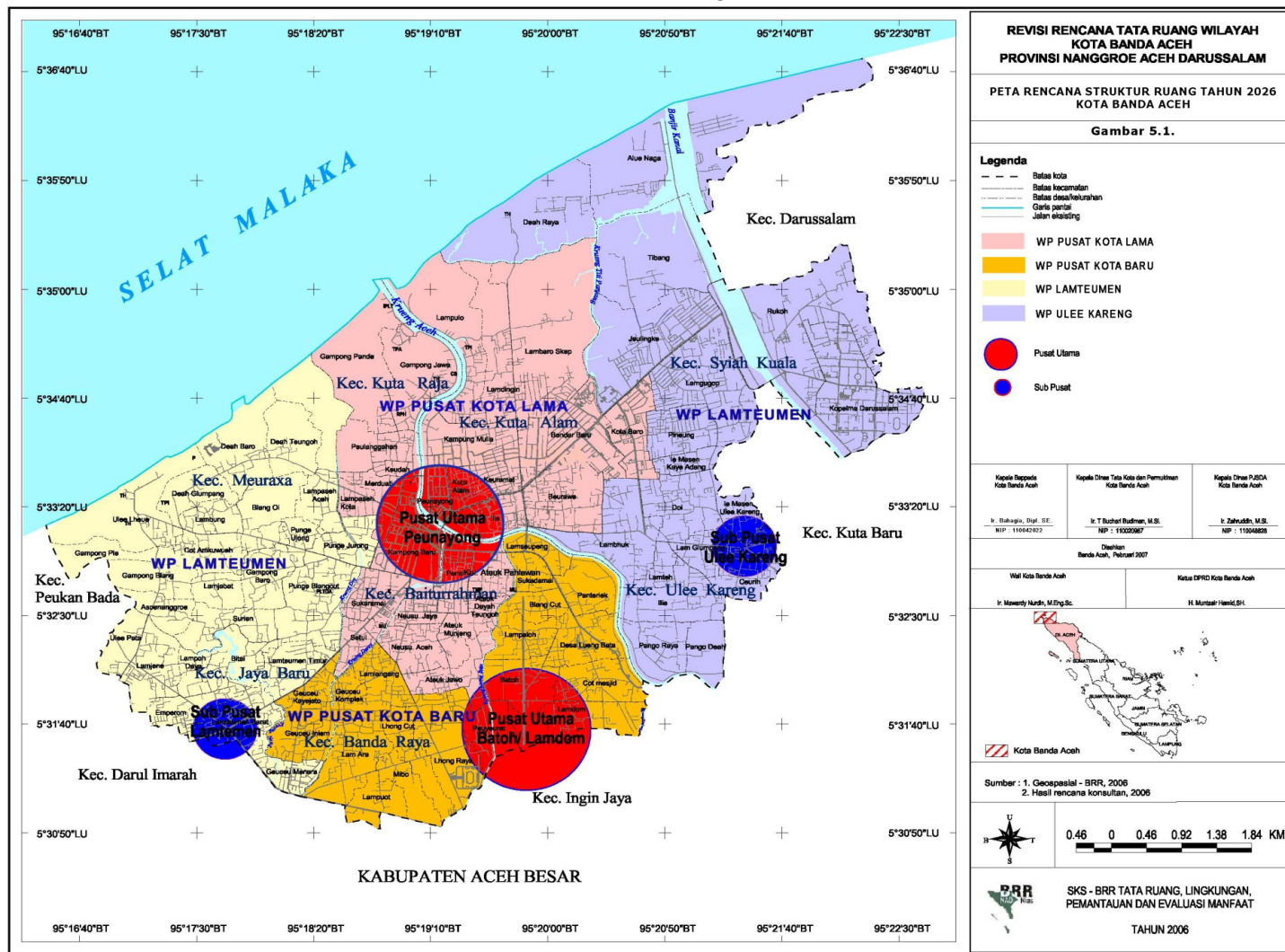
Gambar 2-4 Peta tata guna lahan Kota Banda Aceh tahun 2005



Gambar 2-5 Pengaruh perkembangan Kota Banda Aceh terhadap Kabupaten Aceh Besar



Gambar 2-6 Peta rencana struktur ruang tahun 2026 Kota Banda Aceh



BAB 3 : STRATEGI MENYELURUH PENGEMBANGAN SANITASI KOTA

3.1 Visi dan misi sanitasi

Visi misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arah bagi pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai visi misi kota. Kedua visi misi kota dan sanitasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Visi misi Kota Banda Aceh	Visi misi sanitasi
Visi: Banda Aceh Bandar Wisata Islami Indonesia Misi: 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam secara kaffah. 2. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat. 3. Mengembangkan pariwisata yang bernuansa Islami. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan, lingkungan hidup dan permukiman. 5. Mengembangkan perekonomian masyarakat.	Visi: Bersama Wujudkan Sanitasi Yang Lebih Baik Misi: 1. Meningkatkan fasilitas dan akses layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi bagi seluruh penduduk kota. 2. Mewujudkan warga aman, nyaman, gembira, dan islami 3. Meningkatkan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 4. Meningkatkan ketersediaan dana perbaikan sanitasi secara berkelanjutan 5. Meningkatkan peran lembaga terkait dalam menjalankan program sanitasi 6. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya sanitasi

Catatan: Misi Kota nomor 4, *Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan, lingkungan hidup dan permukiman* sangat terkait dengan komitmen pembangunan sanitasi sebagaimana yang ada dalam visi misi sanitasi.

3.2 Tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sasaran pengembangan sanitasi adalah Kota Banda Aceh namun dengan tetap membuka peluang kajian untuk mengadakan kerjasama pembangunan sanitasi dengan kota/kabupaten tetangga.

3.3 Kebijakan umum pengembangan sanitasi kota

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi tersebut, telah disusun sepuluh (10) kebijakan umum pengembangan sanitasi kota yang tertuang dalam Buku Putih Sanitasi Kota Banda Aceh versi 1. Kesepuluh kebijakan tersebut adalah:

1. Pemerintah kota mengalokasikan dana O&M dan investasi di sektor sanitasi sebesar 7,5% dari APBK pertahun hingga tahun 2012;
2. Penguatan kinerja kelembagaan tim sanitasi;
3. Menguatkan lembaga leading sektor dalam sistem manajemen dan fungsi kontrol secara efektif;
4. Mengupayakan penggalangan sumber daya strategis (dana dan non-dana) non-APBK;
5. Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi perkotaan;
6. Merubah sistem on-site menuju off-site di wilayah prioritas dan wilayah pusat Kota Banda Aceh;
7. Pengelolaan sampah diarahkan pada usaha-usaha produktif (3R, komposting dan pemanfaatan kembali sampah);
8. Industri kecil menengah yang menghasilkan limbah dapat terkontrol melalui pemberian ijin usaha dan mengikuti SPM untuk sanitasi;
9. Industri kecil dan menengah memiliki IPAL mandiri sesuai SNI;
10. Fasilitas umum, tempat pengolahan makanan dan minuman serta permukiman penduduk memenuhi syarat hygiene dan sanitasi.

3.4 Kebijakan saat ini

Walikota Banda Aceh pada tahun 2009 baru saja meluncurkan sebuah program *Visit Banda Aceh Year* tahun 2011 – 2012. Dengan adanya program ini, kebutuhan akan percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi menjadi sangat tinggi. Berkaitan dengan hal itu, telah ditetapkan bahwa perbaikan kesehatan lingkungan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kota Banda Aceh pada tahun 2010 dengan fokus pada kegiatan yang bersifat non-fisik (contohnya adalah kegiatan perubahan perilaku) yang akan menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan fisik tahun berikutnya. Program ini secara tidak langsung menjadi salah satu pendorong perlunya upaya percepatan pembangunan sanitasi di Kota Banda Aceh.

BAB 4 : PENGEMBANGAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR SANITASI 2010 – 2025

4.1 Air bersih

Pengembangan infrastruktur air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy dalam jangka pendek ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan hingga mencapai persyaratan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu 80% cakupan layanan di perkotaan dengan konsumsi 100 l/orang/hari. Dalam jangka panjang, direncanakan seluruh masyarakat Banda Aceh akan mendapatkan pelayanan PDAM Tirta Daroy dengan kualitas air yang diterima adalah kualitas air minum.

Untuk mencapai tujuan itu, wilayah prioritas pengembangan pelayanan air bersih telah disusun berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya: tataguna lahan, kepadatan penduduk, kondisi air tanah dan kemampuan membayar masyarakat. Hasil dari penyusunan prioritas ini dapat dilihat dalam gambar 4-1. Penjelasan lengkap mengenai penyusunan wilayah prioritas ini terdapat dalam SSK Volume 2.

Kondisi saat ini tingkat pelayanan PDAM mencapai 66%⁵ dari total penduduk kota meskipun infrastruktur jaringan perpipaan distribusi air bersih telah menjangkau lebih kurang 85% dari seluruh wilayah Banda Aceh. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam jangka pendek pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih difokuskan pada sektor produksi, jaringan distribusi serta penurunan angka kebocoran melalui kegiatan sebagai berikut:

- Menurunkan tingkat kebocoran melalui pelaksanaan kegiatan *Block Renovation Program* (BRP)⁶. Daerah yang telah ditangani kegiatan BRP hingga saat ini mencapai 12 wilayah dengan sebaran dapat dilihat dalam gambar 4-2. Pada tahun 2010 direncanakan akan ada penambahan 20 wilayah baru dalam penanganan kebocoran melalui BRP. Melalui kegiatan ini tingkat kebocoran PDAM dapat ditekan hingga mencapai rata-rata 40%. Dengan dapat ditekannya angka kebocoran serendah mungkin maka jumlah air yang dapat didistribusikan ke seluruh masyarakat akan bertambah sehingga dapat meningkatkan kecukupan kapasitas untuk penambahan jumlah pelanggan;
- Mengaktifkan sambungan rumah hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami menjadi pelanggan PDAM yang juga akan mengurangi kebocoran secara administratif;
- Melakukan perbaikan jaringan distribusi air bersih yang mengalami kerusakan akibat pembangunan infrastruktur kota;
- Melakukan optimalisasi jaringan perpipaan distribusi yang telah dipasang oleh berbagai donor (lihat gambar 4-3 untuk menunjukkan jaringan perpipaan distribusi yang dimiliki PDAM Tirta Daroy). Hal ini perlu dilakukan karena permasalahan pada jaringan distribusi PDAM Tirta Daroy salah satunya adalah belum digunakannya jaringan perpipaan hasil bantuan selama tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami karena tidak terkoneksi dengan jaringan eksisting PDAM;
- Peningkatan pelayanan air bersih di wilayah pariwisata, pelabuhan dan terminal serta tempat-tempat umum lain (al. kampus).
- Pembayaran rekening dapat dilakukan melalui Bank;
- Peningkatan suplai pengambilan air baku melalui penambahan kapasitas pipa transmisi dari intake ke Instalasi Pengolah Air (IPA) yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2010.

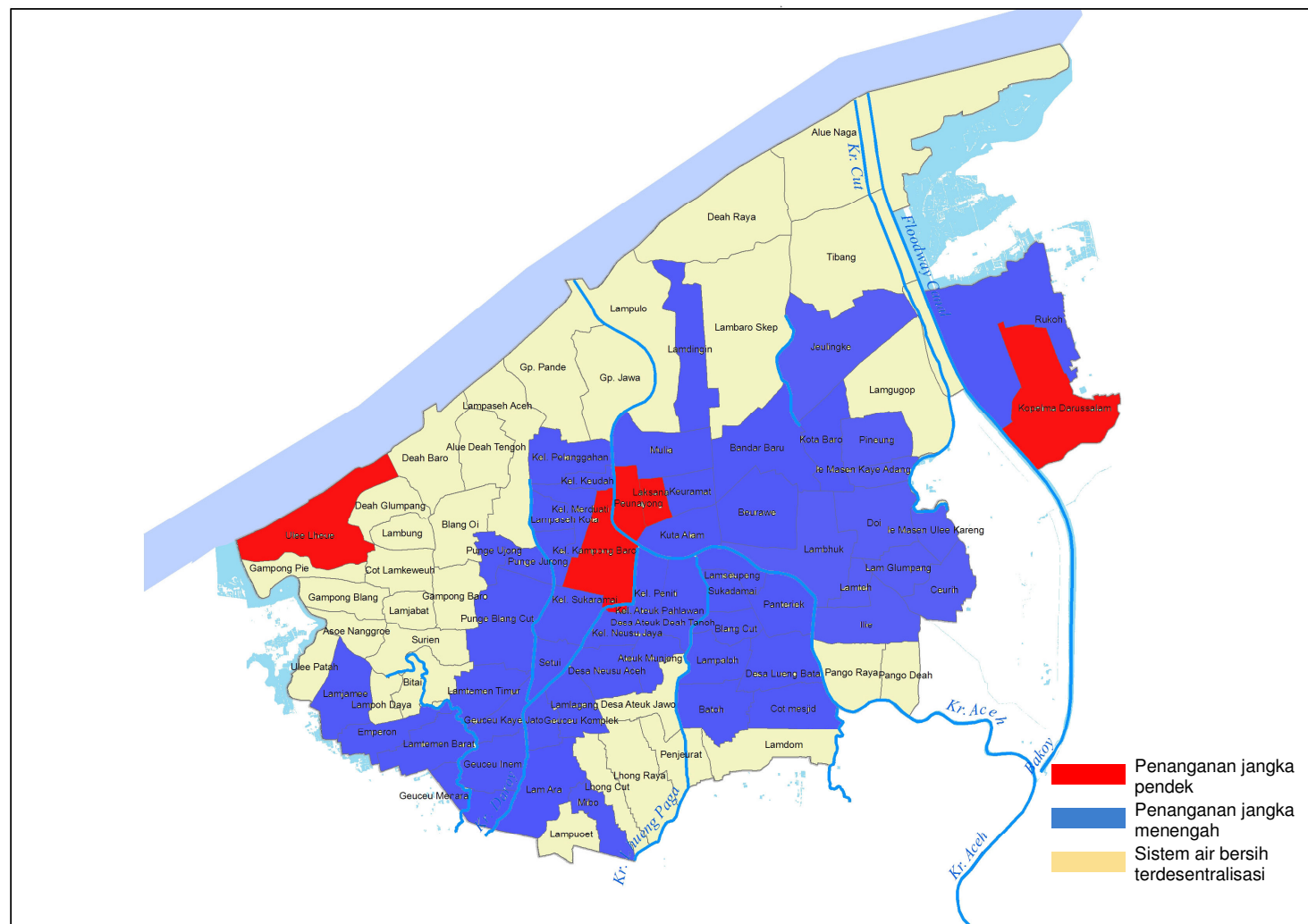
Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, strategi peningkatan layanan air bersih akan meliputi:

- Peningkatan kapasitas produksi IPA Lambaro (kapasitas saat ini 435 l/s) sesuai dengan kebutuhan air pada masa datang;
- Dilakukan upaya untuk mencari sumber air baku potensial selain dari Krueng Aceh karena adanya kemungkinan terjadinya penurunan kualitas dan kuatits dari Krueng Aceh.

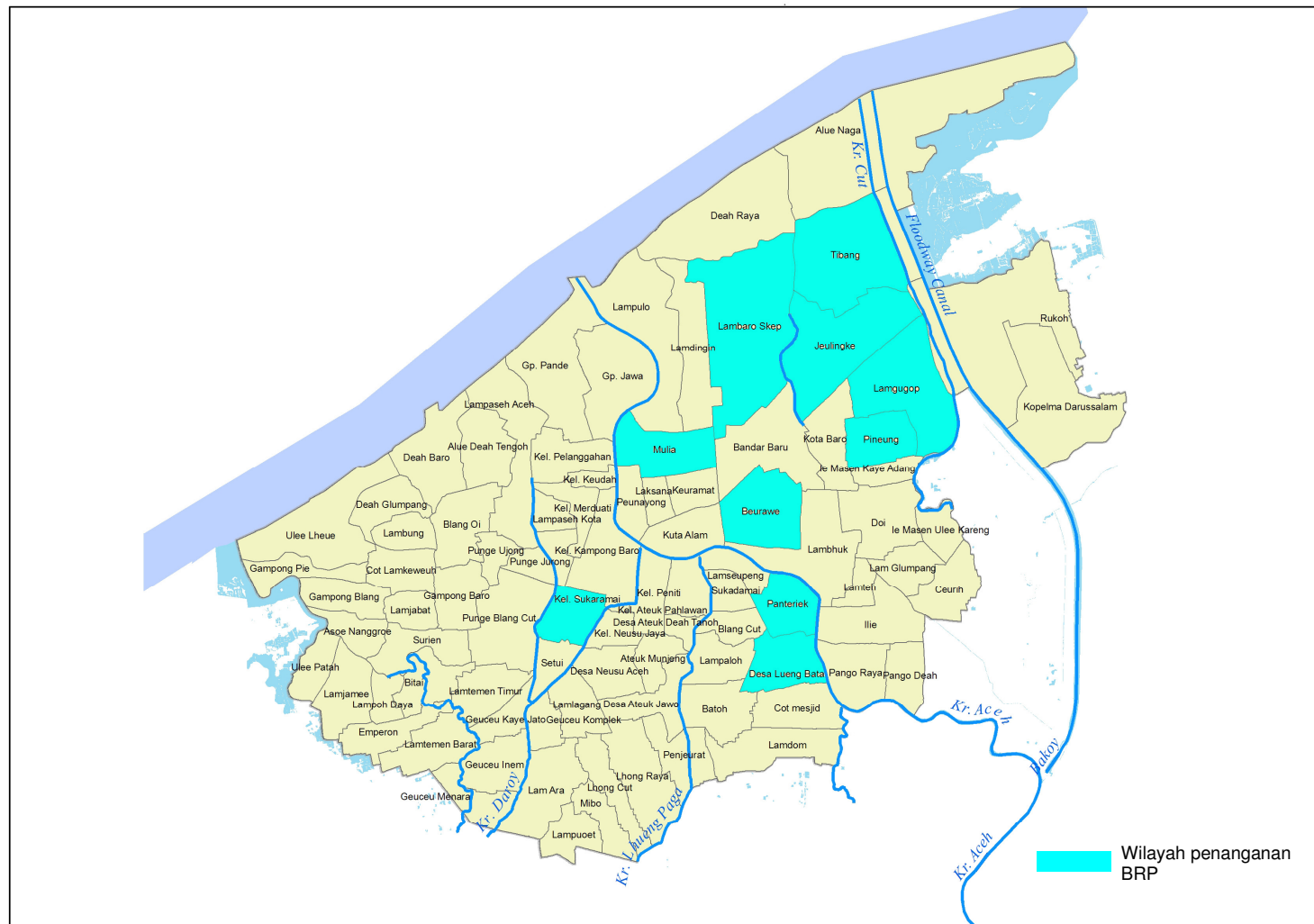
⁵ Jumlah total pelanggan aktif PDAM Tirta Daroy saat ini adalah 28.961 pelanggan. Cakupan pelayanan dihitung berdasarkan asumsi bahwa satu rumah tangga terdiri dari 5 orang sehingga total penduduk yang terlayani diperkirakan 144.805 orang dari 217.940 penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2007.

⁶ Kegiatan BRP merupakan kerjasama antara PDAM Tirta Daroy dengan Belanda melalui SAB-SAS (Sektor Air Belanda untuk Sektor Air Sumatra Bagian Utara). Tujuan utama dari BRP ini adalah penurunan kebocoran (*leakage*) yang dilakukan melalui pembentukan blok-blok isolasi di dalam jaringan distribusi. Terminologi kebocoran ini secara umum menganut definisi yang ditetapkan oleh IWA (*International Water Association*) dalam *IWA Water Balance*.

Gambar 4-1 Penyusunan wilayah prioritas pengembangan air bersih berdasarkan data penduduk tahun 2007



Gambar 4-2 Sebaran wilayah penanganan kebocoran dalam kegiatan BRP hingga tahun 2009



[illegible]

4.2 Air limbah

Dalam bidang pengelolaan air limbah, Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki satu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Gampong Jawa yang didukung armada beberapa truk tinja. Sistem pengolahan limbah terpusat dengan jaringan perpipaan air kotornya (dikenal sebagai sistem *off-site*) untuk saat ini belum dimiliki.

Beberapa inisiatif dalam bidang pengelolaan air limbah telah dilakukan terutama untuk mendorong pengembangan sistem sanitasi on-site yang lebih baik. Inisiatif tersebut diantaranya adalah adanya proses legislasi untuk memasukkan persyaratan infrastruktur sanitasi (tangki septik sesuai SNI) dalam proses pengajuan IMB. Hingga saat ini, proses ini sedang berjalan antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota dan Provinsi dan KPTSP yang difasilitasi oleh Tim Sanitasi. Selain itu, penanganan limbah cair dari sumber pencemar terpusat (*point source*) telah dilakukan dengan menggunakan teknologi DEWATS dan Biodigester. Salah satu sumber pencemar terpusat yang telah menerapkan teknologi ini adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Penanganan atas limbah cair dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Meuraxa juga sedang dilakukan saat ini melalui anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kantor Lingkungan Hidup (KanLH).

Sumber pencemar terpusat penting lainnya adalah Rusunawa⁷ yang sedang dalam tahapan pembangunan. Perhatian telah diberikan oleh Dinas PU bekerjasama dengan Satker Pusat Pembangunan Rusunawa untuk memastikan adanya pengolahan limbah yang memadai baik bagi air limbah cucian dan kamar mandi (*grey water*) maupun air limbah kakus (*black water*).

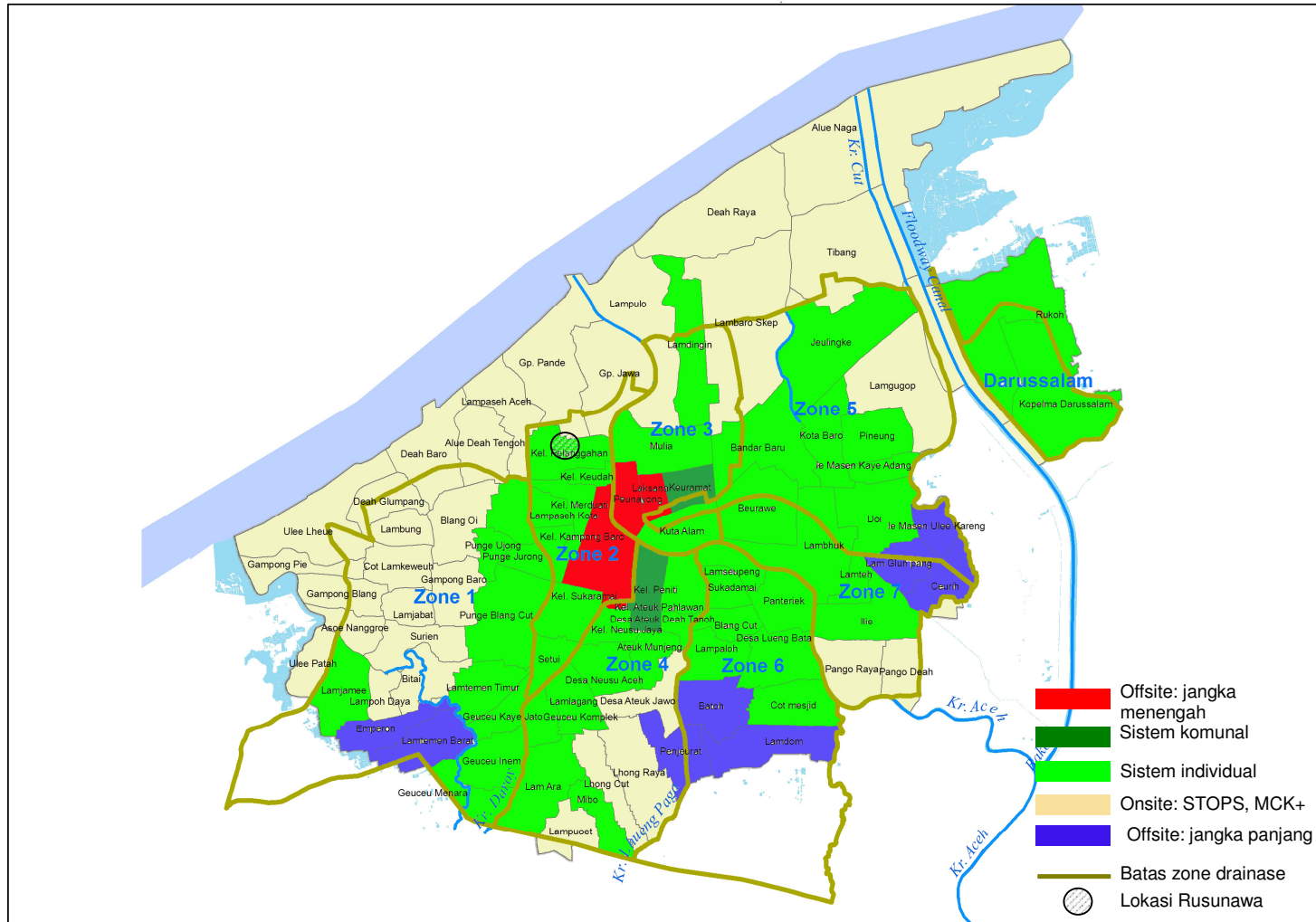
Untuk pengembangan sistem off-site diprioritaskan pada wilayah pusat kota lama dan wilayah prioritas. Berkaitan dengan hal ini, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Banda Aceh telah merencanakan pembangunan tangki septik komunal di wilayah pusat kota lama pada tahun 2010 yang dibiayai oleh DAK. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk secara bertahap menerapkan sistem offsite di wilayah prioritas. Selain itu, terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas pengembangan sistem off-site berdasarkan ketentuan dari SPM.

Di dalam SSK ini, telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan sistem air limbah (apakah onsite maupun offsite) secara umum. Empat (4) kriteria digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu; (i) kepadatan penduduk, (ii) karakteristik tata guna lahan, komersial atau rumah tinggal, (iii) resiko kesehatan, serta (iv) kondisi muka air tanah. Pembahasan mendetail mengenai kriteria ini serta analisisnya terdapat dalam SSK Volume 3. Berdasarkan kriteria tersebut, gambar 4-4 berikut ini menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk masing-masing kelurahah. Untuk memperjelas batas-batas hidrologis yang diperlukan dalam perencanaan pengembangan sistem, peta kebutuhan ini *di overlay* dengan peta zonase jaringan drainase Kota Banda Aceh.

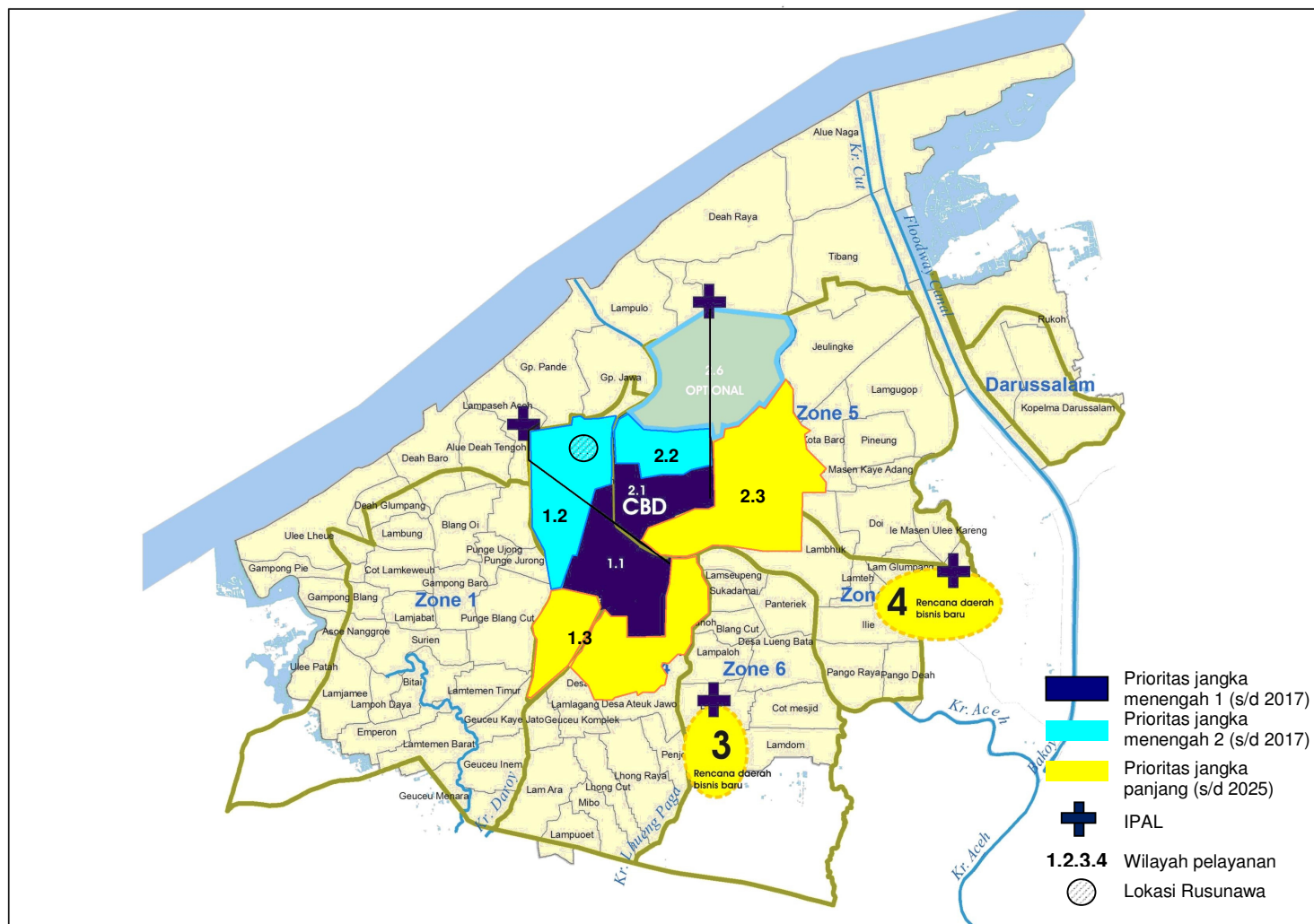
Berdasarkan peta kebutuhan tersebut, rencana pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah terpusat sistem off-site Kota Banda Aceh dikembangkan. Rencana pengembangan ini diilustrasikan pada gambar 4-5. Dalam perencanaan tersebut, diperlukan setidaknya empat (4) unit pengolahan limbah terpusat untuk mendukung sistem offsite secara menyeluruh.

⁷ Rusunawa (**Rumah Susun Sederhana Sewa**) merupakan blok bangunan tempat tinggal yang dikembangkan secara vertikal dalam beberapa tingkat. Program Rusunawa merupakan salah satu program nasional yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Banda Aceh saat ini sedang dibangun dua blok Rusunawa dengan kapasitas 196 KK yang berlokasi di Keudah. Pengembangan dua blok baru direncanakan akan dilakukan setelahnya sehingga total kapasitas akan mencapai 396 KK pada satu area terpusat.

Gambar 4-4 Penyusunan wilayah prioritas pengelolaan air limbah berdasarkan data penduduk tahun 2007



Gambar 4-5 Perencanaan pengembangan bertahap sistem offsite sampai dengan tahun 2025

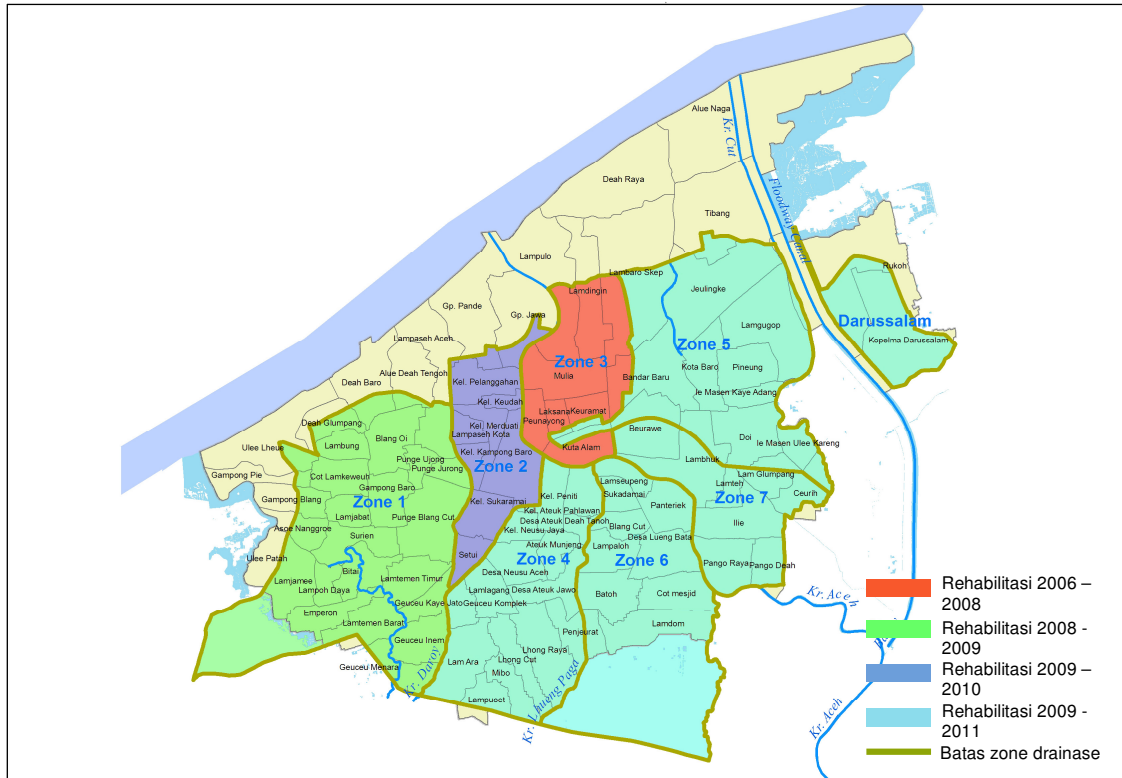


4.3 Drainase

a. Sistem drainase makro dan saluran utama

Kota Banda Aceh menerapkan delapan (8) zona pengelolaan drainase. Pada saat ini kegiatan rehabilitasi jaringan drainase utama (*main drain*) di dalam kedelapan zona drainase tersebut sedang dilakukan dengan bantuan berbagai pihak. Ringkasan kegiatan rehabilitasi yang sedang dilakukan dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Pada tahun 2011 direncanakan seluruh sistem drainase makro⁸ kota Banda Aceh telah selesai direhabilitasi.

Gambar 4-6 Peta pembagian zona drainase dan jadwal rehabilitasi saluran drainase utama



b. Sistem drainase mikro

Kegiatan percontohan dalam hal inventarisasi dan perencanaan rehabilitasi sistem drainase mikro sedang dilakukan di tiga wilayah di Kota Banda Aceh yaitu; Peuniti, Peunayong dan Lamprit. Panjang saluran drainase yang ditangani dalam wilayah percontohan tersebut adalah 81,6 km atau sekitar 7% dari total panjang drainase mikro Kota Banda Aceh. Volume sedimen yang perlu dibersihkan dalam sistem drainase mikro di tiga wilayah tersebut mencapai 13.851 m³ dan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 1,5 tahun untuk pembersihannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, klasifikasi saluran drainase mikro dikembangkan yang dapat dilihat dalam tabel 4-1.

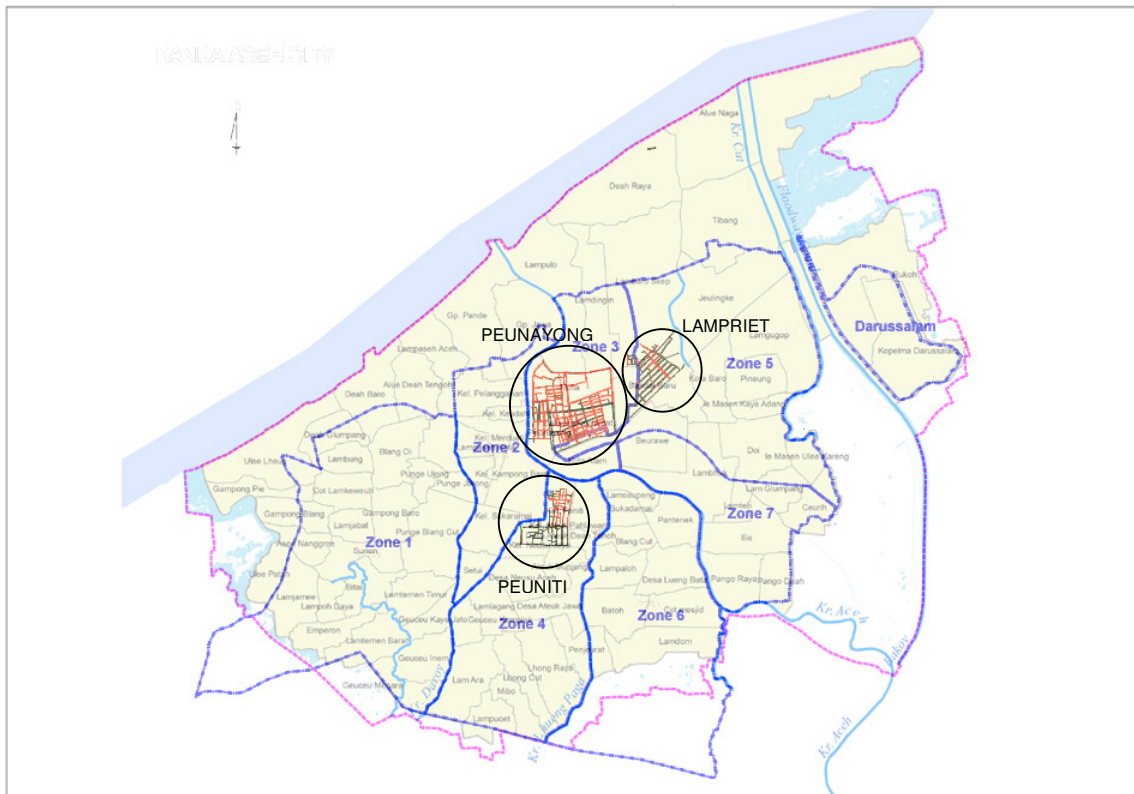
⁸ Dalam pengelolaan sistem drainase di Banda Aceh terdapat tiga istilah yang digunakan yaitu; drainase makro, saluran drainase utama (*main drain*) dan drainase mikro/lingkungan. **Drainase makro** didefinisikan sebagai badan air yang menerima aliran air dari saluran drainase utama (al. sungai). **Saluran drainase utama** menerima aliran air dari sistem drainase mikro/lingkungan dengan daerah tangkapan (*catchments area*) antara 10 – 300 ha. Sedangkan **drainase mikro/lingkungan** adalah sistem drainase paling kecil dengan daerah tangkapan kurang dari 10 ha.

Tabel 4-1 Klasifikasi saluran drainase mikro

Tipe	Klasifikasi panjang saluran	Area (Ha)	Estimasi panjang saluran (km)
Tipe 1	$L > 350$ m/ha	641	279
Tipe 2	$200 < L < 350$ m/ha	2.496	686
Tipe 3	$L < 200$ m/ha	1.167	146
Jumlah		4.304	1.111

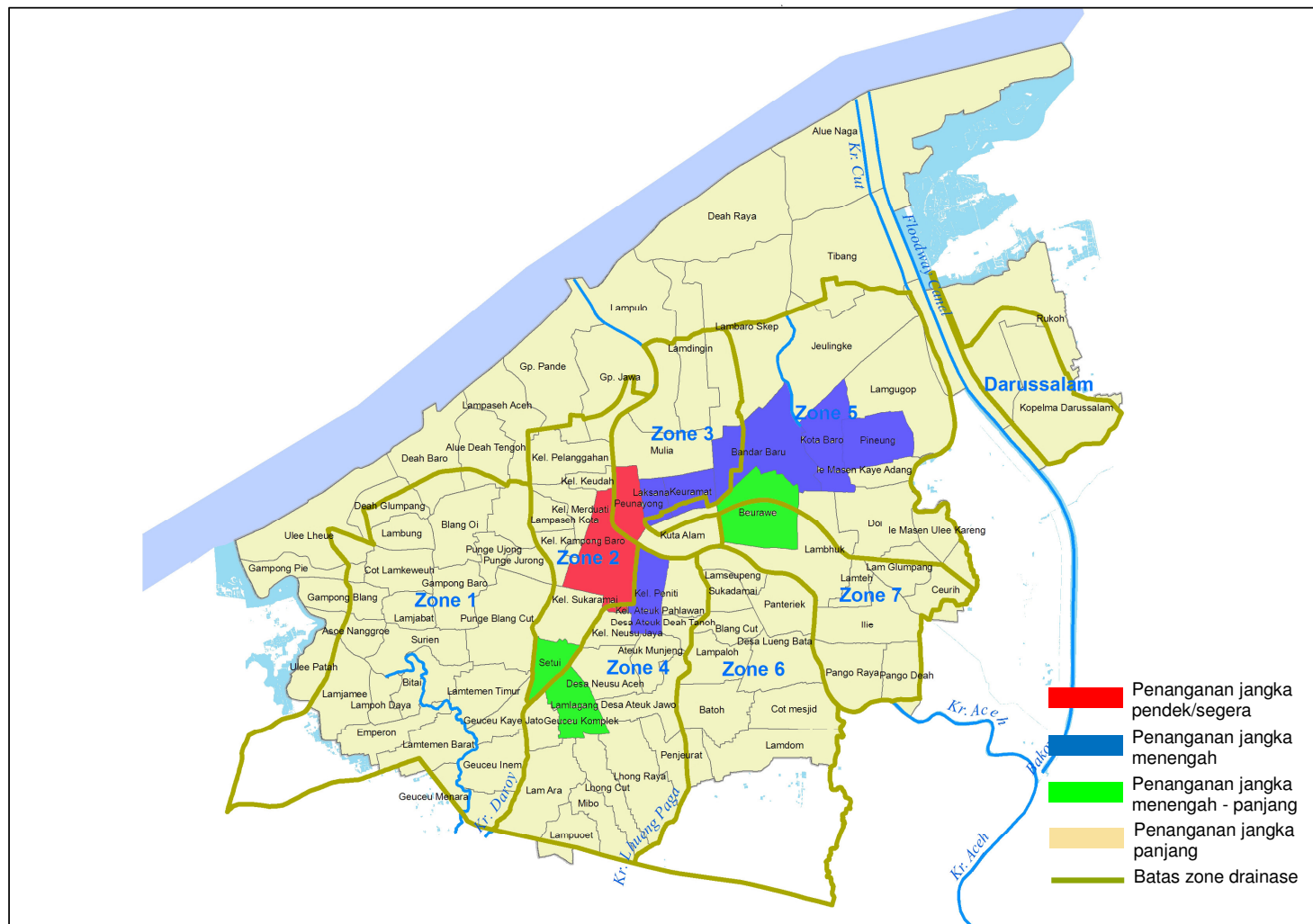
Berdasarkan klasifikasi tersebut, distribusi ketiga tipe saluran tersebut di Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 4-7 Peta distribusi jaringan drainase mikro tipe 1 di Kota Banda Aceh (lokasi wilayah percontohan)



Dalam menentukan pengembangan sistem drainase mikro di Kota Banda Aceh, telah disusun wilayah prioritas pengembangan sistem drainase mikro. Penyusunan daerah prioritas ini dilakukan per kelurahan berdasarkan lima (5) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM yaitu: kepadatan penduduk, pengaruh ekstrem pasang surut dalam bentuk “rob”, tata guna lahan (perdagangan & jasa maupun pemukiman), adanya genangan lebih dari 30 cm serta tingkat resiko kesehatan. Penjelasan lengkap mengenai kriteria seleksi beserta analisisnya terdapat dalam SSK Volume 3. Dalam gambar 4-8 disampaikan hasil penyusunan prioritas pembangunan drainase lingkungan di Banda Aceh tersebut.

Gambar 4-8 Penyusunan wilayah prioritas pembangunan drainase mikro berdasarkan data penduduk tahun 2007



4.4 Persampahan

a. Timbulan sampah

Dalam jangka menengah, timbulan sampah yang perlu diangkut akan dikurangi sebesar 20% dari kondisi sekarang dengan mengintensifkan kegiatan 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*)⁹ yang telah dimulai. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga pada akhirnya dapat memperpanjang masa pakai (*lifetime*) dari TPA tersebut.

Untuk mencapai pengurangan itu langkah-langkah berikut akan dijalankan hingga tahun 2012:

- Mengembangkan kegiatan percontohan industri pengolahan limbah plastik dalam rangka pengembangan kegiatan daur ulang baik untuk limbah plastik maupun limbah lainnya,
- Mengembangkan lebih lanjut dalam skala yang lebih luas usaha pengkomposan skala rumah tangga,
- Mengembangkan kegiatan pemisahan sampah dari sumbernya (*separation at source*). Kegiatan ini selain mendukung upaya pengurangan timbulan sampah juga akan mendukung secara langsung usaha pengkomposan dan daur ulang limbah.

b. Pengangkutan

Dalam jangka panjang, prosentase sampah terangkut akan ditingkatkan menjadi 100%. Peningkatan prosentase sampah terangkut dilakukan dengan meningkatkan prosentase penduduk terlayani dari 76% (2008) menjadi 100% (tahun 2012). Gambar 4-9 memberikan gambaran mengenai layanan pengangkutan sampah saat ini di level kelurahan di Kota Banda Aceh (sumber: *Masterplan persampahan Kota Banda Aceh*).

Selain peningkatan prosentase penduduk terlayani, intensitas pengangkutan sampah 2 kali dalam seminggu direncanakan dapat terjadi di semua wilayah di Kota Banda Aceh (sebagaimana yang disyaratkan dalam SPM).

c. Tempat pemrosesan akhir (TPA)

Saat ini pemrosesan akhir sampah Banda Aceh dilakukan di TPA Gampong Jawa. Kapasitas TPA ini adalah 160 ton/hari dengan total luas wilayah 21 hektar. Diperkirakan pada tahun 2010 TPA ini akan habis masa fungsinya sehingga alternatif TPA baru perlu dikembangkan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dimulai pengembangan TPA regional bekerja sama dengan Kabupaten Aceh Besar dan terletak di Kab. Aceh Besar. Rencana rinci (DED) mengenai TPA ini telah selesai dilakukan dan proses komunikasi dengan Kab. Aceh Besar sedang berlangsung. TPA regional ini direncanakan dapat berfungsi setelah tahun 2010.

d. Pengelolaan limbah medis

Pada saat ini masih terjadi limbah medis yang dibuang ke TPA. Untuk mengantisipasi hal itu sedang direncanakan untuk dikembangkan sebuah tempat khusus untuk bagi pembuangan limbah medis di TPA Gampong Jawa yang dilakukan oleh DK3 bekerjasama dengan UNDP. Untuk mendukung hal itu, koordinasi antar dinas (terutama Dinas Kesehatan dan DK3) akan ditingkatkan untuk menghindari pencampuran limbah medis dalam proses pengangkutan apabila telah dilakukan pemisahan di level pengguna.

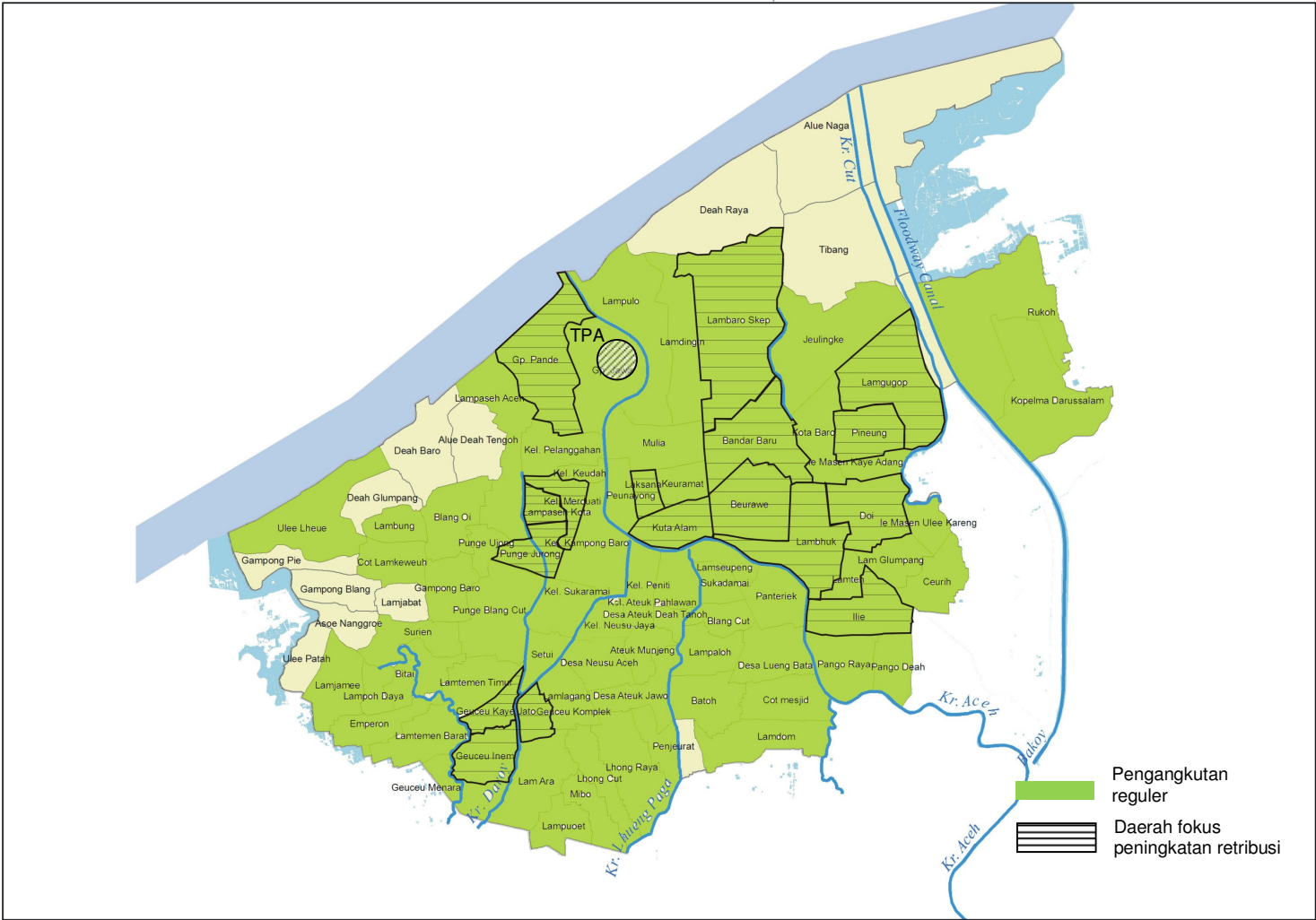
Selain pembangunan tempat pembuangan khusus di TPA Gampong Jawa, penggunaan insinerator di RSUD Meuraxa untuk melakukan pengolahan limbah medis secara *thermal* perlu ditingkatkan. Pemanfaatan insinerator perlu ditingkatkan agar dapat digunakan oleh pihak lain yang juga menghasilkan limbah medis. Dalam jangka pendek kerjasama pemanfaatan bersama insinerator ini perlu untuk difasilitasi oleh Tim Sanitasi.

e. Wilayah prioritas pengembangan

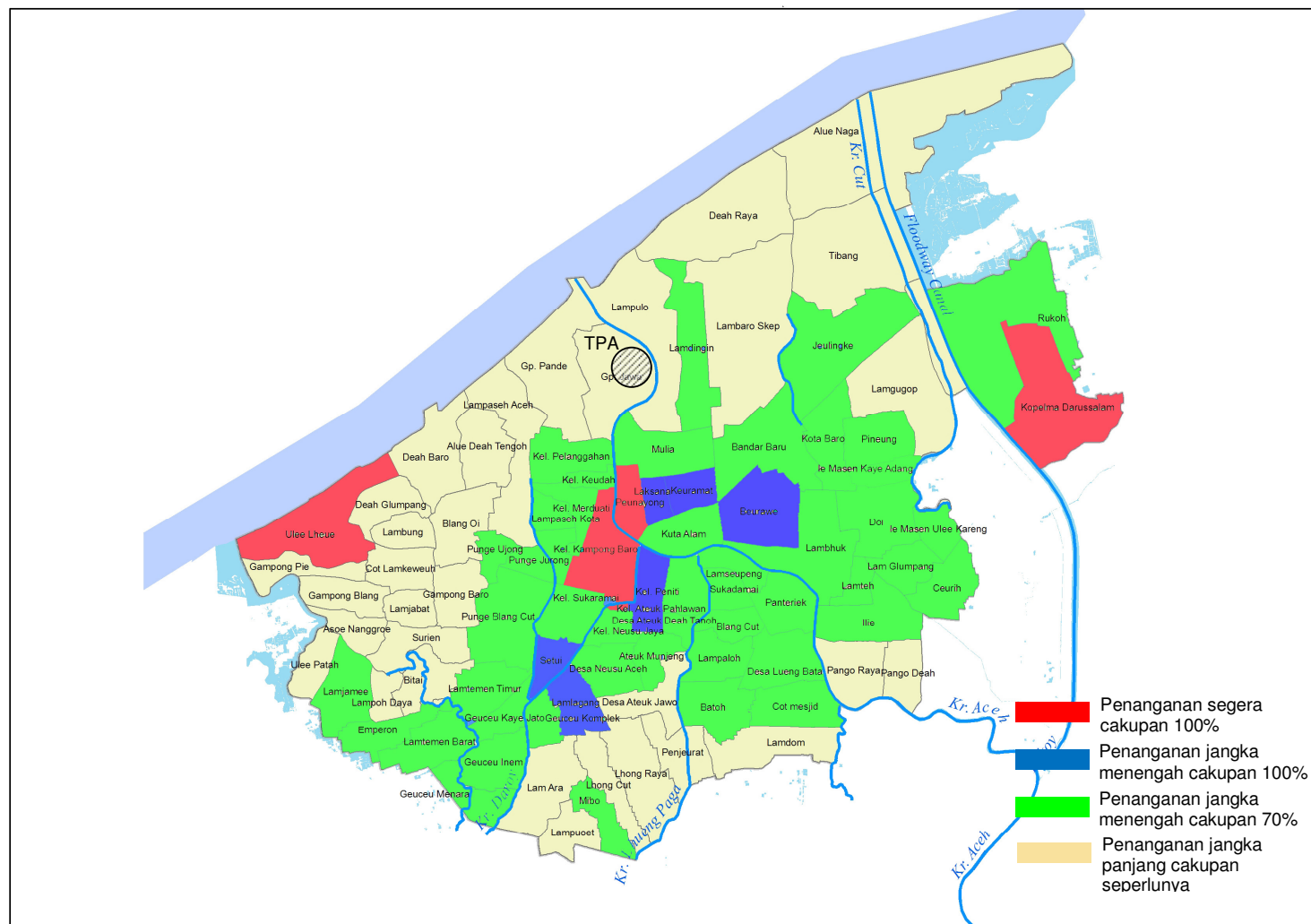
Berdasarkan kriteria yang ada dalam SPM, wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Terdapat dua (2) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu, wilayah tata guna lahan (komersial atau pemukiman, daerah wisata, terminal maupun pelabuhan serta fasilitas umum utama seperti kampus) dan kepadatan penduduk. Penjelasan mendetail mengenai kriteria serta analisisnya akan dilakukan dalam SSK Volume 3. Hasil dari penentuan wilayah prioritas ini terdapat dalam gambar 4-9.

⁹ *Recycle, Reuse, Reduce* (3R) dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Mendaur ulang sampah, Menggunakan kembali sampah, dan Mengurangi timbulan sampah.

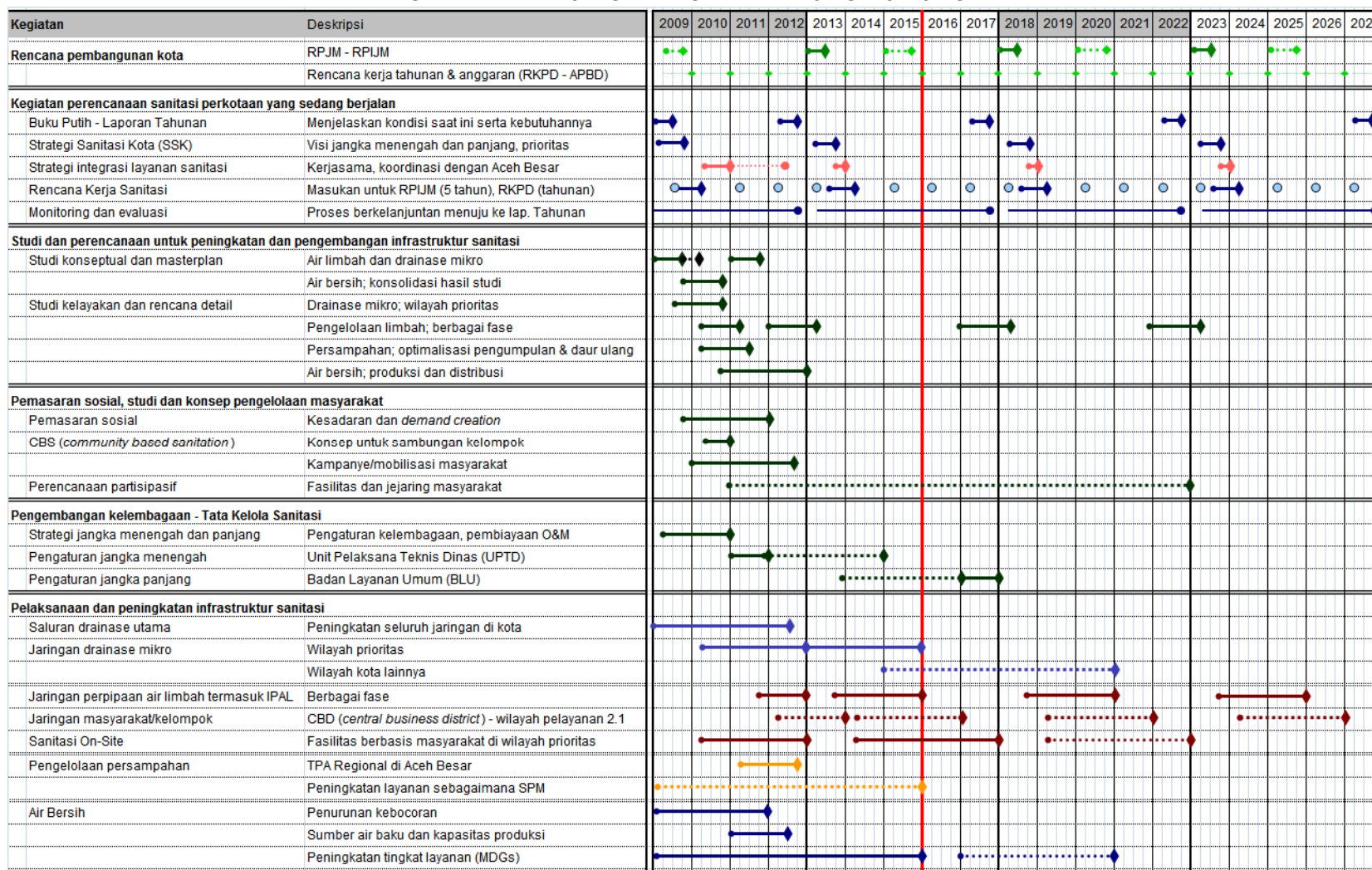
Gambar 4-9 Peta sebaran wilayah dengan layanan pengangkutan sampah reguler saat ini



Gambar 4-10 Penyusunan wilayah prioritas pelayanan persampahan berdasarkan data penduduk tahun 2007



Tabel 4-2 Ringkasan rencana pengembangan sanitasi jangka panjang di Kota Banda Aceh



BAB 5 : STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK 2010 – 2025

5.1 Kegiatan pemantauan layanan sanitasi

Dengan adanya pemberlakuan undang-undang perlindungan konsumen maka kedudukan pelanggan memiliki posisi tawar yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah kota dan lembaga penyedia layanan sanitasi perlu memberikan perhatian lebih terhadap upaya untuk mencapai pelayanan sanitasi yang lebih baik.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan, adanya masukan dari pengguna manfaat layanan sangat penting. Masukan dari pengguna layanan ini merupakan hasil dari adanya kegiatan pemantauan layanan secara mandiri.

Mengingat fungsinya yang sangat penting bagi peningkatan layanan sanitasi, kegiatan pemantauan mandiri dari masyarakat perlu dikembangkan. Kegiatan pemantauan ini akan diorganisir pada level paling rendah yaitu level desa/kelurahan yang akan tersedia di seluruh desa/kelurahan di Banda Aceh. Keberadaan kegiatan pemantauan di seluruh desa/kelurahan akan membentuk jaringan pemantauan layanan sanitasi di Kota Banda Aceh yang berperan lebih besar daripada sekedar forum pelanggan (pemanfaat layanan) seperti yang selama ini sudah dikembangkan terutama dalam bidang air bersih.

Untuk mengembangkan kegiatan ini, Tim Sanitasi berperan sebagai inisiator bagi pembentukan kegiatan pemantauan ini. Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan adalah strategi jangka pendek yang akan dilakukan bersamaan dengan penyiapan manual untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan mandiri disertai manual pelaporan hasil dari pemantauan yang dilakukan.

Inisiatif terhadap kegiatan pemantauan layanan sanitasi ini telah mendapat tanggapan dari pemerintahan di tingkat gampong. Hingga saat ini, Tim Sanitasi telah menerima masukan dari setidaknya dua Gampong yang menyampaikan rendahnya pelayanan infrastruktur drainase yang menyebabkan timbulnya genangan. Dalam upaya penyelesaiannya, Tim Sanitasi melakukan serangkaian kegiatan identifikasi bersama dengan perangkat Gampong setempat serta memfasilitasi dan memastikan permasalahan tersebut sampai di Dinas teknis terkait.

5.2 Keterlibatan masyarakat

Adanya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pengembangan sanitasi. Keterlibatan ini penting karena akan mendorong adanya rasa kepemilikan atas infrastruktur sanitasi tersebut sehingga akan mendorong keberlangsungan layanan sanitasi.

Sebuah dokumen penting mengenai adanya komitmen setiap komponen kota untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sanitasi telah dilahirkan. Dokumen ini merupakan sebuah

Deklarasi Bersama yang secara eksplisit menunjukkan komitmen setiap komponen kota untuk mendukung program percepatan pembangunan sanitasi dan juga berpartisipasi aktif di dalamnya berdasarkan kemampuan dan potensi masing-masing.

Atas dasar ini, strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sanitasi penting dikembangkan. Dalam jangka pendek, peningkatan keterlibatan masyarakat dilakukan melalui:

- Memperkuat pelaksanaan usaha untuk menempatkan kelompok pengguna dalam pengambilan keputusan pada seluruh tahapan pembangunan serta pengelolaan sarana sanitasi. Prinsip ini telah diadopsi selama masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca Tsunami dalam “Petunjuk dasar pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan” (lihat **Boks 5** untuk penjelasan rinci).
- Memberi dukungan kepada kegiatan gotong royong sebagai salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan layanan sanitasi. Sebuah inisiatif untuk mendorong kegiatan gotong royong

Kotak 3: Deklarasi Bersama Sanitasi Kota Banda Aceh

Komitmen keterlibatan komponen kota terhadap pengembangan sanitasi di Banda Aceh ditandai dengan lahirnya deklarasi bersama sanitasi Kota Banda Aceh. Deklarasi merupakan hasil dari pelaksanaan seminar **“Pembangunan Sanitasi untuk Pelayanan Warga Kota Banda Aceh yang Lebih Baik”** pada tanggal 3 – 4 Agustus 2009. Dua hal utama dalam deklarasi tersebut adalah: (1) adanya kesadaran dari seluruh komponen kota bahwa sanitasi merupakan aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesehatan warga serta, (2) adanya dukungan dari komponen kota terhadap upaya percepatan pembangunan sanitasi. Scan naskah deklarasi ini dapat dilihat pada lampiran.

dalam bidang sanitasi telah dilakukan di Kelurahan Ateuk Pahlawan terutama ditujukan untuk pembersihan saluran drainase lingkungan (lihat **Boks 4**). Replikasi atas inisiatif sejenis perlu dikembangkan di wilayah lain di seluruh Kota Banda Aceh.

- Membentuk gampong sadar sanitasi agar proses keterlibatan masyarakat menjadi lebih terorganisasi dan terjadi dari level paling bawah struktur pemerintahan kota. Gampong sadar sanitasi didasarkan atas keterlibatan masyarakat dalam menanggapi layanan sanitasi di empat sektor sanitasi yang ada: air bersih, air limbah, drainase dan persampahan. Kompetisi Gampong Sadar Sanitasi dapat juga berperan untuk memotivasi gampong/desa untuk meningkatkan kondisi sanitasi di wilayahnya.
- Mendorong konsolidasi, penelitian, pengembangan dan diseminasi pilihan teknologi untuk mendukung prinsip pemberdayaan masyarakat. Strategi ini dijalankan melalui penyusunan katalog teknologi tepat guna dalam pengelolaan sanitasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip *informed choice*.

Selain strategi jangka pendek tersebut di atas dalam jangka menengah sampai dengan jangka panjang akan diterapkan hal-hal sebagai berikut:

- Memperkuat dan memberi dukungan bagi organisasi masyarakat serta gampong untuk dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dari kegiatan pengembangan sarana dan layanan sanitasi.
- Membangun serta memperkuat program pembinaan bagi anak-anak di bidang sanitasi. Pembinaan usia dini ini menjadi salah satu kunci bagi adanya keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembinaan ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung strategi ini adalah pembentuk sekolah¹⁰ sadar sanitasi.

Kotak 4: Gotong royong di Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh

Proses Gotong Royong terdiri dari tujuh (7) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan dan prioritas – Bagaimana dapat diperbaiki?
2. Mobilisasi dan pertemuan dengan pemuka masyarakat
3. Perencanaan kegiatan dan mengorganisir dukungan
4. Hari gotong royong
5. Publikasi di media
6. Evaluasi dan inspeksi lapangan setelah dibersihkan
7. Pertemuan tindak lanjut dengan masyarakat

Selama proses gotong royong di Ateuk Pahlawan, pelajaran yang dapat diambil adalah:

- Sistem drainase lingkungan dapat dibersihkan oleh masyarakat, sedangkan pembersihan drainage utama yang umumnya memiliki ukuran lebih besar, merupakan tugas dari pemerintah;
- Gotong royong merupakan sebuah proses yang perlu untuk difasilitasi;
- Kondisi awalnya adalah adanya komitmen dari masyarakat dan juga Tim Sanitasi;
- Dukungan lain diperlukan dari pemerintah kota untuk membuat gotong royong menjadi efektif dan dapat meningkatkan motivasi masyarakat;
- Dukungan dari sebuah kelompok kerja (Pokja) khusus gotong royong dapat meningkatkan efektivitas dari gotong royong tersebut;
- Pokja tersebut harus terorganisir dengan baik serta berjalan dengan profesional;
- Pokja ini memerlukan mandat untuk menyediakan informasi serta peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan gotong royong;
- Pokja gotong royong harus memahami permasalahan dan dapat menjelaskan apa yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat;
- Masyarakat dapat berkontribusi dalam bentuk apapun, misalnya tenaga kerja, snack serta peralatan kerja;
- Gotong royong merupakan kegiatan yang dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pada tingkat masyarakat dalam bidang pengembangan sanitasi.

¹⁰ Sekolah diartikan sebagai lembaga pendidikan secara umum termasuk di dalamnya lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren.

5.3 Keterlibatan swasta dan dunia usaha

Selain keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sanitasi sebagaimana disebutkan di atas, peran aktif dari swasta dan dunia usaha perlu ditingkatkan. Untuk mendorong peran aktif tersebut, pendekatan partisipasi sektor swasta (*private sector participation*) dalam pelaksanaan pekerjaan rutin pengelolaan layanan sanitasi dapat ditingkatkan. Kemitraan dengan swasta dapat dilakukan dengan cara Kerja Sama Operasional (KSO), atau membuat perusahaan patungan antara pemerintah, lembaga penyedia layanan sanitasi yang ada saat ini, dengan swasta lokal dan atau asing.

Dalam skala yang lebih kecil, beberapa pengelolaan sarana sanitasi yang telah dilakukan dengan jalan melibatkan sektor swasta perlu diperluas. Contoh nyata dari kegiatan ini adalah pengelolaan fasilitas mandi dan kakus di Masjid Baiturrahman yang dijalankan dan dikelola oleh swasta.

Untuk mendukung visi misi kota dalam bidang pariwisata, penyediaan serta pengelolaan fasilitas toilet umum menjadi penting. Dalam jangka pendek, pengelolaan fasilitas ini dapat dikerjasamakan dengan swasta.

5.4 Komunikasi

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi adalah pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang arti pentingnya sanitasi. Agar partisipasi masyarakat publik meningkat dalam pembangunan serta pengelolaan sanitasi, pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap arti penting sanitasi serta kelestarian lingkungan harus ditingkatkan.

Dalam jangka pendek, komunikasi sanitasi dilakukan dengan mengoptimalkan media sosialisasi dan kampanye yang telah tersedia untuk menyampaikan pesan sanitasi kepada publik. Beberapa media yang dapat digunakan antara lain website kota, papan informasi di gampong, serta mengoptimalkan peran ulama dan khotib Jumat untuk menyampaikan pesan mengenai sanitasi dan kebersihan diri serta lingkungan.

Agar upaya ini berkelanjutan, diusahakan untuk melibatkan institusi lokal, baik dari lembaga pendidikan formal dan informal, LSM dan lembaga lainnya. Hal ini penting dilakukan karena sosialisasi dan kampanye tersebut harus memperhatikan keragaman adat, budaya, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu, sebuah strategi komunikasi berlingkup kota perlu dikembangkan agar upaya kampanye tersebut dapat terarah serta berkelanjutan.

BAB 6 : STRATEGI TATA KELOLA SANITASI 2010 – 2025

6.1 Perkembangan tim sanitasi

a. Peran tim sanitasi jangka panjang

Hingga saat ini, Tim Sanitasi telah berkembang untuk dapat berperan lebih besar dalam kegiatan pengembangan sanitasi di Kota Banda Aceh. Dalam lokakarya di Medan pada bulan Juni 2009 untuk penyusunan SSK, telah dihasilkan sepuluh refleksi atas peran Tim Sanitasi jangka panjang sebagai tanggapan atas masukan dari Sekda Banda Aceh sebagai Ketua Tim Pengarah Sanitasi. Kesepuluh refleksi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Sanitasi menjadi tim independen yang dapat memberi masukan (*second opinion*) bagi pemerintah kota dan juga dapat berperan sebagai *pressure group* untuk meningkatkan layanan sanitasi;
- 2) Keberadaan tim sanitasi dapat dirasakan oleh seluruh elemen Kota Banda Aceh;
- 3) Tim sanitasi dapat memberikan masukan untuk memperbaiki kinerja SKPK;
- 4) Tim sanitasi melaporkan secara rutin (setiap dua bulan) kepada Sekda Banda Aceh sebagai Ketua Tim Pengarah Sanitasi;
- 5) Mengaktifkan kembali rapat reguler dan pelaporan reguler;
- 6) Semakin kuatnya komitmen tim dan komitmen dari pimpinan SKPK untuk pengembangan sanitasi kota;
- 7) Pelaporan rutin dari masing-masing anggota Tim Sanitasi kepada kepala SKPK masing-masing. Laporan ini dapat dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang disusun oleh salah satu anggota tim sanitasi yang dilakukan secara bergiliran. Copy dari laporan ini dapat dikirimkan ke Camat. Sebelumnya dilakukan sosialisasi terhadap para camat mengenai tim sanitasi;
- 8) Tim sanitasi menyusun program kerja;
- 9) Perlunya kerjasama antara Tim Sanitasi dengan universitas/akademisi;
- 10) Tim sanitasi perlu dikenal di masyarakat agar dapat menangkap permasalahan sanitasi yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui: pembuatan stiker, pemanfaatan MIMS, media TV maupun radio dan baliho;

b. Strategi penguatan Tim Sanitasi

Berdasarkan refleksi tersebut maka peran yang diharapkan dari Tim Sanitasi menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab formal tim sebagaimana yang ada dalam Keputusan Walikota No. 304 Tahun 2008. Untuk dapat mencapai hal itu, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Sampai dengan tahun 2012, kelembagaan Tim Sanitasi akan tetap sebagai Tim Kerja yang beranggotakan perwakilan dari berbagai SKPK. Di masa datang, dimungkinkan adanya perubahan status kelembagaan Tim Sanitasi berdasarkan pertimbangan kebutuhan ruang lingkup, wilayah kerja serta keanggotaan yang akan dibutuhkan pada masa itu dalam rangka menjawab tantangan kesepuluh refleksi di atas. Salah satu bentuk kelembagaan yang dapat dipertimbangkan adalah Badan Sanitasi walaupun tidak menutup kemungkinan bentuk kelembagaan yang lain (Dewan, Komite maupun tetap sebagai Tim Kerja).
- Hal ini diawali dengan menyusun tugas dan tanggung jawab detail Tim Sanitasi (Tupoksi Tim Sanitasi) untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pengembangan sanitasi dengan badan/dinas lainnya. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2009 – 2010.
- Pengembangan sumber daya (baik SDM maupun keuangan) Tim Sanitasi yang dilakukan melalui:
 - Mengadakan training mengenai proses fasilitasi dan koordinasi;
 - Mengadakan training mengenai penganggaran kegiatan pengembangan sanitasi;
 - Adanya on-the-job training yang dilakukan melalui kegiatan pendampingan teknis (*technical assistance*) dari tim ahli;
 - Memperjelas alokasi anggaran Tim Sanitasi dari APBK;
 - Melakukan kerjasama dengan universitas/akademisi dalam rangka kapasitas anggota Tim Sanitasi.

6.2 Menguatkan kerangka hukum lokal untuk pengembangan sanitasi

a. Penyusunan kebijakan layanan sanitasi

Kebijakan layanan sanitasi perlu disusun agar upaya pengembangan sanitasi dapat berhasil. Kebijakan ini akan berbentuk qanun sanitasi yang mengacu pada SPM yang sedang disiapkan oleh pemerintah serta target yang ada dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Selain itu, prinsip-

prinsip teknis yang secara resmi sudah dikeluarkan juga akan menjadi salah satu dasar bagi penyusunan qanun sanitasi ini (lihat **Boks 5 dan 6**).

Qanun sanitasi ini akan meliputi setidaknya:

- SPM layanan air bersih;
- SPM layanan air limbah;
- SPM layanan drainase, dan;
- SPM layanan persampahan.

b. Update berkala dokumen sanitasi

Kebijakan untuk melakukan update berkala dokumen sanitasi (Buku Putih dan SSK) perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan kebijakan update tersebut dalam peraturan formal dan mungkin dapat menjadi salah satu masukan dalam qanun sanitasi di atas.

c. Penyusunan kebijakan sanitasi gampong

Selain penguatan kerangka hukum dalam bentuk qanun, adanya peraturan gampong tentang sanitasi juga diperlukan. Peraturan gampong ini akan menjadi aturan operasional bagi pengelolaan sanitasi di tingkat gampong.

d. Penguatan daya dukung pelaksanaan kebijakan sanitasi

Dalam jangka pendek, upaya pengintegrasian sarana sanitasi ke dalam persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bangunan baru yang akan didirikan benar-benar memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan sesuai dengan standar yang disyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, dua rangkaian program berikut perlu untuk dilaksanakan dalam jangka pendek sampai menengah:

- Program pengkondisian kebijakan sanitasi; dilakukan melalui advokasi serta sosialisasi kebijakan dan peraturan sanitasi baik di tingkat SKPK, DPRK maupun masyarakat, serta pemberlakuan masa uji coba implementasi baru terkait dengan sanitasi.
- Program pemberdayaan lembaga sanitasi lokal; program ini penting untuk dijalankan agar layanan sanitasi tidak selalu bersifat *government driven* sehingga layanan ini dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh masyarakat. Program ini dijalankan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Pembentukan kader sanitasi dan santri pelopor sanitasi;
Kader sanitasi merupakan agen pemberdaya di tingkat masyarakat yang ditempatkan untuk mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbangun dan mulai berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sanitasi.
 - ✓ Pembentukan gampong sadar sanitasi;
Gampong sadar sanitasi dibentuk sebagai salah satu upaya menjadikan sanitasi mendapat perhatian utama dalam proses pembangunan gampong. Selain itu, program ini untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang baik atas infrastruktur sanitasi yang ada.
 - ✓ Pembentukan *Help Desk* Sanitasi;
Help desk ini akan berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Kota Banda Aceh mengenai berbagai permasalahan sanitasi.

Kotak 5: Petunjuk dasar pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan (sustainable) untuk Rekonstruksi di Aceh dan Nias

1. Tidak memperbolehkan air limbah yang belum terolah dialirkan ke saluran drainase umum
2. Semua sistem sanitasi harus terdiri dari minimum dua langkah pengolahan yaitu pengolahan primer dan sekunder
3. Tangki septik harus bekerja dalam keadaan kedap air
4. Setiap proyek perumahan dan sanitasi harus memiliki komponen manajemen masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan

Sumber: BRR dan Pemprov Aceh

Kotak 6: Kode Bangunan (*Building Code*) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mengenai air limbah

Persyaratan

1. Semua air limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang saluran air limbah kota dan dibawa ke instalasi pengolahan limbah apabila tersedia;
2. Pembuangan harus dilengkapi dengan perangkat bau;
3. Pengolahan dilakukan dengan tangki septik kedap air dan dilengkapi dengan sumur resapan
4. Air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta elemen radioaktif harus ditangani berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Detail

Tangki septik mengacu pada SNI 03-6379-2000

- Kecuali kota memiliki saluran air limbah;
- Jarak antara tangki septik dan sumur resapan terhadap sumur air bersih minimal adalah 10 m;
- Lokasi dari tangki septik dapat berada di depan maupun belakang rumah, tergantung dari kemudahannya untuk menyalurkan air limbah dari kamar mandi/kakus dengan mempertimbangkan jarak minimum dengan sumur air bersih dan lingkungan sekitarnya;
- Prosedur perencanaan tangki septik dan sumur resapan mengacu ke SNI 03-6379-2000;
- Untuk wilayah dengan muka air tanah yang tinggi (kurang dari 1 m), tangki septik dibuat lebih tinggi dan resapan dibuat agar mengalir secara horizontal.

Sumber: Building Code Provinsi Aceh, Dinas PU

6.3 Strategi pendanaan sanitasi

Percepatan pembangunan sanitasi memerlukan dukungan aspek pendanaan yang kuat (terutama untuk pembangunan infrastruktur). Agar mendapatkan dukungan tersebut strategi di bawah ini perlu dilakukan:

- Melakukan advokasi kepada Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK atau di kota lain dikenal sebagai DPRD Tingkat II) agar terjadi peningkatan alokasi pendanaan sanitasi hingga sebesar 7,5% dari ABPK pada tahun 2012.
- Disamping itu, upaya advokasi kepada Pemerintah Provinsi Aceh akan dilakukan untuk memperoleh dukungan pendanaan dari provinsi.
- Pendanaan pembangunan sanitasi melalui hutang (*loan*) dapat dilakukan setelah melalui kajian yang matang dari berbagai aspek.
- Disamping ketiga alternatif pendanaan tersebut di atas, pendanaan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan juga bertumpu pada efektivitas penarikan retribusi. Penarikan retribusi serta struktur retribusi untuk layanan sanitasi akan ditingkatkan hingga setidaknya dapat menutupi 75% dari biaya operasi dan pemeliharaan yang ada. Akan tetapi, dalam jangka panjang perhitungan retribusi yang ada akan berdasarkan pada prinsip *Full Cost Recovery*. Sebagai langkah awal, saat ini dibentuk wilayah percontohan untuk peningkatan efektivitas penarikan retribusi bagi layanan pengelolaan persampahan.

6.4 Persiapan proyek dan proses penganggaran

Agar kegiatan pengembangan sanitasi dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan maka persiapan pelaksanaan proyek perlu dilakukan sebaik mungkin. Untuk itu perlu dilakukan:

- Penyusunan studi kelayakan dan masterplan per-sektor. Saat ini master plan persampahan telah tersedia dan disetujui oleh DPRK demikian juga untuk masterplan drainase. Masterplan air bersih dan air limbah akan disiapkan dan menjadi prioritas kegiatan dalam jangka pendek.
- Selanjutnya studi mendetail akan dilakukan dalam kegiatan *Detailed Engineering Design* (DED). Kegiatan ini menghasilkan perkiraan anggaran biaya yang menjadi masukan dalam penyusunan anggaran serta penyusunan RPK di tiap dinas sesuai dengan alur perencanaan dan penganggaran yang berlaku (lihat gambar 2.2).

Lampiran: Naskah deklarasi bersama sanitasi

Halaman 1:

DEKLARASI BERSAMA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI BAGI PELAYANAN
WARGA KOTA BANDA ACEH

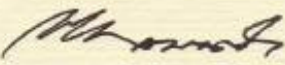
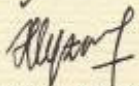
Assalamu'alaikum Wr. Wb

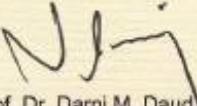
Dengan rahmat Allah SWT, kami dari seluruh komponen Kota Banda Aceh menyampaikan dukungan terhadap upaya percepatan pembangunan sanitasi di Kota Banda Aceh. Kami menyadari bahwa sanitasi yang terdiri dari pelayanan air bersih, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan serta pelayanan persampahan merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan warga.

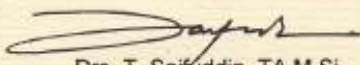
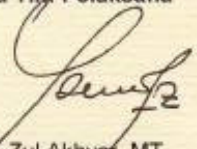
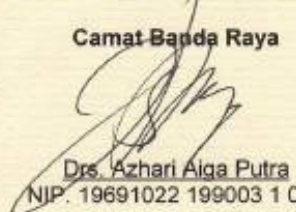
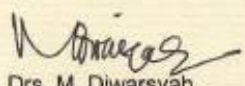
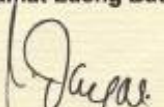
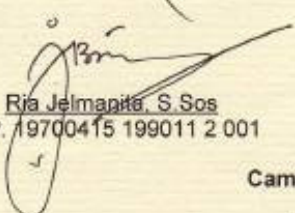
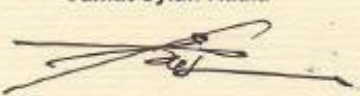
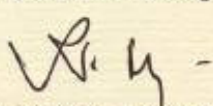
Dukungan ini akan kami wujudkan melalui adanya partisipasi bersama upaya pembangunan sanitasi berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada dari setiap komponen Kota Banda Aceh. Semoga niatan tulus ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani oleh seluruh komponen Kota Banda Aceh
pada hari Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2009

Walikota Banda Aceh  Ir. Mawardy Nurdin, M. Eng.Sc	Wakil Walikota Banda Aceh  Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE
--	--

Perwakilan Akademisi
Rektor Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. Darni M. Daud, MA
NIP. 19610725 198602 1 002

<u>Tim Sanitasi Kota Banda Aceh</u>	
Ketua Tim Pengarah Sekda Kota Banda Aceh	Ketua Tim Pelaksana
 <u>Drs. T. Saifuddin, TA M.Si</u> NIP. 19541110 197801 1 001	 <u>Ir. T. Zul Akhyar, MT</u> NIP. 19641008 199310 1 001
<u>Camat se – Kota Banda Aceh</u>	
Camat Meuraxa	Camat Jaya Baru
 <u>Bachtiar, S.Sos</u> NIP. 19690913 199011 1 001	 <u>Rita Puji Astuti, AP</u> NIP. 19760407 199503 2 001
Camat Banda Raya	Camat Baiturrahman
 <u>Drs. Azhari Alga Putra</u> NIP. 19691022 199003 1 002	 <u>Drs. M. Diwarsyah</u> NIP. 19700916 199003 1 002
Camat Lueng Bata	Camat Kuta Alam
 <u>M. Hidayat, S.Sos</u> NIP. 19700921 1991 1 001	 <u>Fadhil, S.Sos, MM</u> NIP. 19680919 199011 1 001
Camat Kuta Raja	Camat Sylah Kuala
 <u>Ria Jelmanita, S.Sos</u> NIP. 19700415 199011 2 001	 <u>Drs. Dwi Putrasyah</u> NIP. 19640208 198503 1 007
Camat Ulee Kareng	
 <u>Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si</u> NIP. 010 245 749	